

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
SAMPAH PADA BADAN KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN KABUPATEN KARIMUN**



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat
Administrasi Publik**

Disusun Oleh :

MONALISA

NIM. 500627592

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2017

Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun

Monalisa

monalisa_sukri@yahoo.com

Program Pascasarjana Universitas Terbuka

ABSTRAK

Kebijakan tentang pengelolaan sampah telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Namun permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun masih belum dapat diatasi sampai saat ini. Kebijakan pengelolaan sampah ini dibuat untuk memberikan pedoman pengelolaan sampah bagi pemerintah selaku pelaksana kebijakan dan bagi masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan tersebut. Untuk mengukur pencapaian sasaran atau tujuan yang diinginkan dari suatu kebijakan, Edward II berpendapat bahwa ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pimpinan dan pegawai pada Badan Kebersihan dan pertamanan Kabupaten Karimun, yang berjumlah 41 orang. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan. Pengujian t-test menunjukkan bahwa variabel komunikasi dan sumber daya berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan, sedangkan variabel disposisi dan struktur birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Kesimpulan dari penelitian ini agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun dapat berhasil dengan baik, maka Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun harus memperhatikan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, implementasi kebijakan.

Analyzing factors influencing policy implementation of garbage management on
cleanliness and Plantation Board of Karimun district

Monalisa

monalisa_sukri@yahoo.com

Master Programs Universitas Terbuka

ABSTRACT

Policy on garbage management regulated in the regional bill of karimun district number 7 year 2013 on Garbage Management. Nevertheless, the problem of garbage management has not been solved yet. Garbage management policies have been made in order to guide government as implementers of the policy and to guide society as a goal of the policy. In order to measure achievement of desirable goals, Edward II asserts that there are four factors influencing the success of implementation of the policy; communication, resources, disposition and structure of bureaucracy.

The aim of this study is to examine the influence of communication, resources, disposition and structure of bureaucracy towards implementation of the policy. Population in this study was all of the leaders and employees of cleanliness and plantation board of karimun district, 40 people in total. The analysis used in this study is multiple regression analysis. The result of this research shows that communication, resources, disposition and structure of bureaucracy simultaneously influence implementation of the policy. T-test experiment shows that communication and resources have influenced implementation of the policy. Meanwhile, disposition and structure of bureaucracy have not.

This study concludes that in order to successfully implement the policy of garbage management of karimun district, the cleanliness and plantation board of karimun district should give attention to communication, resources, disposition and structure of bureaucracy.

Keywords: communication, resources, disposition, structure of bureaucracy, implementation of the policy

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

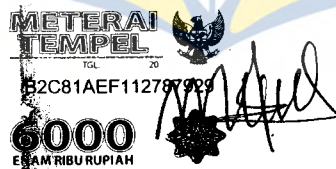
PERNYATAAN

TAPM yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun

Adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik

Batam, 31 Oktober 2016
Yang menyatakan



Monalisa
NIM 500627592

LEMABAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun.

Penyusun TAPM : Monalisa

NIM : 500627592

Program Studi : Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Sabtu, Desember 2016

Menyetujui

Pembimbing I



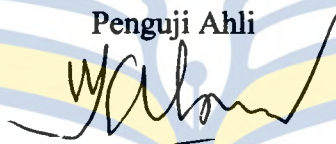
Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA
NIP. 19470401 196805 1 001

Pembimbing II



Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si
NIP. 19631111 198803 2 002

Penguji Ahli



Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc
NIP. 19570302 198807 1 001

Mengetahui

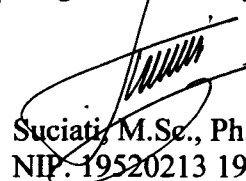
Ketua Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Program Pascasarjana



Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003



Direktur
Program PascaSarjana



Suciati, M.Sc., Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

Nama : Monalisa
 NIM : 500627592
 Program Studi : Magister Administrasi Publik
 Judul Tesis : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM), Program Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Minggu, 18 Desember 2016

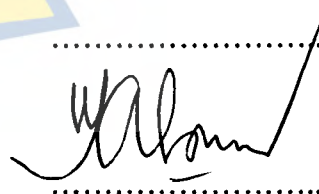
Waktu : 15.00 WIB – 16.30 WIB

Dan telah dinyatakan : LULUS

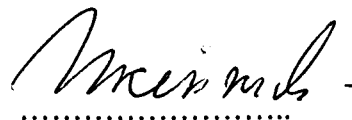
PANITIA PENGUJI TESIS

Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
 Nama : drh. Ismed Sawir, M.Sc



Penguji Ahli
 Nama : Dr. Roy Valiant Salomo, M.Soc.Sc



Pembimbing I
 Nama: Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA

Pembimbing II
 Nama : Dr. Ir. Nurhasanah, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia.Nya, sehingga Tugas Akir Program Magister (TAPM) yang berjudul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun.’**

Penulisan TAPM ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa pelaksanaan penulisan TAPM ini melibatkan bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Suciati, M.Sc, Ph.D, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka;
2. Bapak drh. Ismed Sawir, M.Sc, selaku Kepala UPBJJ-UT Batam, penyelenggara Program Pasca Sarjana;
3. Bapak Prof. Dr. Aries Djaenuri, MA, selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Nurhasanah, M.Si selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan TAPM ini.
4. Bapak Dr. Darmanto, M.Ed selaku Ketua Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Terbuka, selaku penanggung jawab Program Megister Administrasi Publik.

5. Bapak drh. Ismed Sawirm M.Sc selaku pimpinan UT UPBJJ Batam beserta staf yang telah banyak membantu dalam penyelesaian TAPM ini.
6. **Suamiku tercinta Sukrianto Jaya Putra, SP, MM dan anak-anakku tersayang Muhammad Ghazi Rasyid, Muhammad Ghyats Rasyid dan Nada Nabilah** yang telah memberikan dukungan, semangat, cinta, kasih sayang serta motivasi yang sangat besar dalam penyelesaian TAPM ini.
7. Kedua orang tua dan saudara-saudaraku yang senantiasa memberikan semangat dalam penyelesaian TAPM ini.
8. Bapak / Ibu pimpinan dan staf dilingkungan Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun selaku responden yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian ini.
9. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian TAPM ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian TAPM ini. Penulis menyadari sepenuhnya akan kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki sehingga TAPM ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan TAPM ini. Akhirnya penulis berharap semoga TPAM ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Batam, Desember 2016
Penulis,

MONALISA
NIM 500627592

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------|----------------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Tujuan Penelitian | 12 |
| D. Manfaat Penelitian | 12 |
| II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Teori | 14 |
| B. Penelitian Terdahulu | 48 |
| C. Kerangka Berpikir | 51 |
| D. Operasional Variabel | 53 |
| III METODE PENELITIAN | |
| A. Desain Penelitian | 58 |
| B. Populasi dan Sampel | 60 |
| C. Instrumen Penelitian | 61 |
| D. Prosedur Pengumpulan Data | 62 |
| E. Metode Analisis Data | 63 |
| IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Deskripsi Objek Penelitian | 76 |
| B. Hasil | 81 |
| C. Pembahasan | 94 |
| V KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 106 |
| B. Saran | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | 109 |

DAFTAR TABEL

| NO | NAMA TABEL | Halaman |
|-----------|--|----------------|
| 1.1 | Sarana Pengangkutan Sampah Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun..... | 5 |
| 2.1 | Penelitian terdahulu Yang Relevan | 48 |
| 2.2 | Operasionalisasi Variabel | 55 |
| 3.1 | Bobot Nilsi Jawaban Responden..... | 62 |
| 3.2 | Hasil Uji Validitas Komunikasi | 70 |
| 3.3 | Hasil Uji Validitas Sumber Daya | 71 |
| 3.4 | Hasil Uji Validitas Disposisi | 72 |
| 3.5 | Hasil Uji Validitas Struktur Birokrasi | 73 |
| 3.6 | Hasil Uji Validitas Implementasi Kebijakan | 74 |
| 3.7 | Hasil Uji Reliabilitas Data | 75 |
| 4.1 | Nilai VIF Uji Multikolenioritas | 85 |
| 4.2 | Hasil Analisis Regresi dengan Metode Enter | 87 |
| 4.3 | Hasil Analisis Korelasi Ganda | 89 |
| 4.4 | Koefisien Determinan | 90 |
| 4.5 | Hasil Uji F | 91 |
| 4.6 | Hasil Uji t | 92 |

DAFTAR GAMBAR

| | | Halaman |
|-----------|---|----------------|
| NO | NAMA GAMBAR | |
| 2.1 | Sekuensi Implementasi Kebijakan | 18 |
| 2.2 | Model Implementasi Kebijakan Edward III | 21 |
| 2.3 | Model Implementasi Donal Van Meter dan Van Horn | 23 |
| 2.4 | Model Implementasi Kebijakan Jan Merse | 25 |
| 2.5. | Skema Teori Variabel-variabel yang mempengaruhi implemplementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun | 26 |
| 2.6 | Kerangka Pemikiran | 52 |
| 3.1 | Desain Penelitian | 59 |
| 4.1 | Struktur Organisasi Badan Kebersihan Dan Pertanaman Kabupaten Karimun | 78 |
| 4.2 | Normal Probability Plot | 83 |
| 4.3 | Grafik Scatterplot | 86 |

DAFTAR LAMPIRAN

| NO | NAMA LAMPIRAN | Halaman |
|-----------|---|----------------|
| 1 | Kuisisioner Penelitian | 112 |
| 2 | Tabulasi jawaban Kuisisioner | 117 |
| 3 | Hasil Analisis Data menggunakan SPSS 23 | 123 |
| 4 | Pedoman Wawancara | 135 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, sehingga sebagian besar kegiatan perekonomian berada di kota seperti perindustrian, perdagangan, perkantoran dan pendidikan. Berbagai kegiatan tersebut yang berpusat di kota membawa konsekuensi sebagian besar aktivitas manusia berada di kota. Salah satu permasalahan akibat kegiatan tersebut yang sangat mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat kota adalah sanitasi lingkungan. Permasalahan ini ternyata bukan hanya diakibatkan oleh kegiatan masyarakat yang bertempat tinggal di kota, tetapi juga dapat berasal dari kelompok urban atau pendatang dari daerah lain yang melakukan aktivitas sehari-harinya di kota. Permasalahan ini akan semakin kompleks apabila sumber daya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menangani permasalahan tersebut berada dalam jumlah terbatas.

Permasalahan sanitasi lingkungan dapat disebabkan jumlah penduduk kota yang makin meningkat sebagai akibat volume timbulan sampah yang dihasilkan dari aktivitas penduduk makin bertambah. Jumlah volume sampah berbanding lurus dengan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang atau material yang digunakan sehari-hari. Oleh karena itu, permasalahan pengelolaan sampah berkaitan dengan gaya hidup masyarakat.

Sampah perkotaan adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan.

Sebelum pemerintah mewajibkan sistem pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2008, sistem pengelolaan sampah di Indonesia hanya dilakukan dengan cara konvensional yaitu dengan cara kumpul, angkut dan buang. Dengan demikian semua sampah akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tanpa dilakukan pengelolaan.

Jumlah sampah yang dihasilkan masyarakat yang beraktivitas di kota harus dikendalikan karena apabila hal ini tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh maka nantinya hampir seluruh daerah di Indonesia kekurangan lahan untuk dijadikan lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Bahkan banyak kejadian yang tidak diinginkan terjadi di TPA, seperti yang terjadi di TPA Leuwigajah Cimahi Jawa Barat yang terjadi pada tahun 2006. Berawal dari kejadian tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup mencari solusi untuk pemecahan masalah pengelolaan sampah di Indonesia. Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah, yaitu UU RI nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun konsep pengelolaan sampah adalah pengurangan sampah dengan cara *Reuse*, *Reduce* dan *Recycle* (3R). Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 ini, salah satu kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah adalah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi.

UU RI nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditindaklanjuti dengan PP Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Permendagri Nomor 33 Tahun

2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Sebagai tindak lanjut dari ketiga peraturan perundangan ini, setiap daerah diwajibkan menyusun kebijakan tentang pengelolaan sampah yang dituangkan dalam peraturan daerah.

Seperti halnya dengan daerah kabupaten/kota lainnya, Kota Tanjung Balai Karimun merupakan salah satu kota yang tidak luput dari permasalahan lingkungan, yaitu permasalahan pengelolaan sampah. Dari waktu ke waktu pemerintah Kota Tanjung Balai Karimun kesulitan dalam menangani permasalahan sampah kota yang berasal dari aktivitas kehidupan masyarakat. Hal yang paling memprihatinkan adalah tidak tertampungnya sampah tersebut di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sememal, sehingga lokasi TPA yang terbatas telah penuh dengan sampah dan tidak terkelola secara maksimal. Hal ini disebabkan cara pengelolaan sampah yang dilakukan masih menggunakan paradig lama yaitu kumpul, angkut dan buang.

Kota Tanjung Balai Karimun merupakan ibukota Kabupaten Karimun yang terletak di Pulau Karimun, dan terdiri dari empat kecamatan yaitu: Kecamatan Karimun, Kecamatan Tabing, Kecamatan Meral dan Kecamatan Meral Barat. Jumlah penduduk yang makin bertambah dari tahun ke tahun menyebabkan volume sampah yang dihasilkan di wilayah ini makin bertambah setiap tahunnya. Sementara pelayanan sampah yang dilakukan pemerintah Kabupaten Karimun sangat terbatas yaitu pengelolaan sampah belum dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan. Tiga dari keempat kecamatan yang ada di Kota Tanjung Balai Karimun memiliki penduduk yang padat, yaitu Kecamatan Karimun, Kecamatan Meral dan Kecamatan Tebing, sedangkan Kecamatan Meral Barat mempunyai jumlah penduduk yang lebih sedikit karena

merupakan daerah pemekaran. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

Peningkatan jumlah penduduk akan meningkatkan volume sampah yang dihasilkan. Peningkatan volume sampah ini tidak diikuti dengan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, yaitu sampah tidak dikelola dengan prinsip 3R, sehingga tidak semua sampah dapat dilayani oleh pemerintah untuk diangkut ke TPA.

Sampah yang tidak terlayani akan di buang oleh masyarakat di sembarangan tempat, seperti di lahan-lahan kosong, di saluran air/drainase, dibuang kelaut dan ada yang dibakar. Dengan demikian terlihat bahwa sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tidak terkelola dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya penumpukan sampah pada lahan-lahan kosong yang dijadikan oleh masyarakat sebagai tempat pembuangan sampah, adanya sampah yang berserakan di luar TPS yang telah disediakan dan tercampurnya semua jenis sampah sehingga mempersulit pengangkutan dan pengelolaan sampah di TPA.

Berdasarkan data dari Badan Kebersihan Dan Pertamanan diketahui bahwa volume timbulan sampah perhari untuk Kota Tanjung Balai Karimun pada tahun 2015 sebesar 196 m^3 . Sedangkan jumlah rata-rata sampah yang terangkut dan dikelola di TPA adalah 106 m^3 per hari dan dikelola secara 3R sebesar 13 m^3 per hari. Sehingga sampah yang tertangani untuk kota Tanjung Balai Karimun sebesar 61 % . Dari data ini terlihat bahwa masih terdapat 39% sampah yang belum tertangani. Sehingga hal ini menimbulkan permasalahan yang menyebabkan pengelolaan sampah yang belum berwawasan lingkungan, yaitu dengan cara pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

Disamping itu, ditemukan juga permasalahan pengangkutan sampah yang sering terlambat, bahkan sampai beberapa hari dan menimbulkan pemandangan dan bau tidak enak di sekitar lokasi TPS (container sampah) yang belum terangkut. Hal disebabkan kurangnya sarana pengangkutan dan TPS (kontainer) yang tersedia. Berdasarkan data dari Badan Kebersihan dan Pertamanan diketahui jumlah sarana pengangkutan sampah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Sarana Pengangkutan Sampah
Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun

| No | Jenis Armada | Jumlah (unit) | Kondisi |
|----|---------------------|---------------|---------|
| 1 | Armroll | 6 | Baik |
| 2 | Dump Truck | 4 | Baik |
| 3 | Pick up | 2 | Baik |
| 4 | Kendaraan roda tiga | 7 | Baik |
| 5 | Kontainer | 26 | Baik |

Data diatas terlihat bahwa sarana pengangkutan sampah yang tersedia masih kurang untuk dapat melayani timbulan sampah yang ada di Kota Tanjung Balai Karimun. Hal ini menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan sampah. Kondisi ini akan lebih sulit apabila masyarakat yang merupakan penghasil sampah tidak mau ikut berperan seta dalam pengelolaan sampah dari rumah tangga masing-masing, yaitu dengan cara mengurangi sampah.

Volume sampah yang makin meningkat yang masuk ke TPA menimbulkan permasalahan dalam ketersediaan lahan untuk TPA. Lahan TPA yang ada yaitu TPA Sememal dengan luas $\pm 3,7$ ha sampai saat ini sudah tidak

layak lagi digunakan untuk menampung sampah kota yang semakin hari semakin meningkat. Sementara untuk mencari lahan pengganti ataupun perluasan lahan yang telah ada sangat sulit. Hal ini disebabkan karena kriteria penentuan lokasi TPA yang sulit terpenuhi untuk Kota Tanjung Balai Karimun yang merupakan pulau kecil, sehingga sulit untuk mendapatkan lahan untuk pengganti atau perluasan TPA yang sudah ada. Untuk itu perlu dilakukan pengurangan sampah yang masuk ke TPA dengan cara melakukan pengelolaan sampah berwawasan lingkungan dan sesuai dengan pedoman pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, baik oleh pemerintah berupa UU Nomor 18 tahun 2008, PP Nomor 81 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 33 tahun 2010, maupun pemerintah daerah berupa Peraturan daerah kabupaten karimun Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.

Upaya untuk mengatasi permasalahan pengelolaan sampah, Kabupaten Karimun telah membuat kebijakan pengelolaan sampah yang dituangkan pada Peraturan daerah No 07 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, sebagai tindak lanjut dari amanat UU RI Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. Peraturan yang dibuat merupakan kebijakan publik yang harus diimplementasikan kepada masyarakat, karena kebijakan merupakan suatu upaya tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.

Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 pasal 10 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah ditujukan pada sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah tangga dan sampah spesifik. Pada pasal 11 juga dijelaskan bahwa sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebelum dibawa ke TPS, TPST dan/atau TPS 3R dilakukan pengelolaan, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Pengurangan sampah bertujuan untuk membatasi timbulan sampah yang akan dibuang ke TPS/TPST/TPS 3R, menjadikan sampah sebagai sumber daya seoptimal mungkin dan memperpanjang masa pakai TPA.

Pengurangan timbulan sampah dilakukan melalui kegiatan minimalisasi timbulan sampah, mendaur ulang sampah dan atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Sampai saat ini sampah yang dihasilkan oleh masyarakat belum dipilah sesuai dengan jenisnya, yang menyebabkan semakin meningkatnya timbulan sampah yang masuk ke TPA dan menyebabkan banyaknya tumpukan sampah sehingga tidak terangkut dengan maksimal.

Melalui kebijakan publik tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun, diharapkan permasalahan pengelolaan sampah harus dapat diatasi dengan kebijakan yang telah dibuat. Adapun tujuan dari kebijakan pengelolaan sampah yang dibuat adalah agar pengelolaan sampah dilakukan dengan cara berwawasan lingkungan dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Perda Pengelolaan Sampah, Dengan demikian diharapkan sampah yang masuk Ke TPA akan berkurang.

Upaya untuk mengatasi permasalahan ini diharapkan dapat diatasi melalui implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang telah tertuang dalam Perda Kabupaten Karimun Nomor 07 tahun 2013. Apabila kebijakan ini sudah tersosialisasi dan dipahami oleh masyarakat yang beraktivitas di kota diharapkan implementasi kebijakan tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Guna mendukung hal ini, maka perlu diketahui pemahaman masyarakat terhadap kebijakan tersebut dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Agar implementasi kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun dapat berjalan dengan baik, maka perlu peran dari instansi yang menangani pengelolaan sampah selaku pelaksana kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Tujuan kebijakan akan sampai kepada sasarannya apabila telah diimplementasikan oleh pelaksana kebijakan, dalam hal ini adalah Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun..

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat terlaksana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Hal yang harus diperhatikan agar kebijakan pemerintah dapat diterapkan adalah arus informasi dan komunikasi agar tidak terjadi pemahaman yang berbeda antara isi kebijakan yang diberikan oleh pusat dengan persepsi aparat pelaksana di

daerah. Penerapan kebijakan pemerintah juga perlu dukungan sumber daya maupun stakeholders yang terkait dengan proses implementasi kebijakan di daerah, pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan di daerah.

Hasil penelitian tentang Implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Baubau menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah dipengaruhi oleh faktor komunikasi, sumber daya, didposisi dan struktur birokrasi. Komunikasi sangat penting dalam penerapan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Pemahaman system komunikasi yang dijalankan secara efektif kepada seluruh pelaksana kebijakan, sehingga dapat menciptakan suatu informasi yang lugas kepada pelaksana kebijakan.

Sumber daya juga sangat menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya sarana persampahan. Dengan tersedianya ketiga sumber daya tersebut akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan perngelolaan sampah. Sumber daya manusia merupakan modal utama untuk mendorong pelaksanaan implementasi kebijakan. Dengan adanya sumber daya manusia yang memadai akan dapat melaksanakan program dan kegiatan yang direncana sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan.

Sedangkan sumber daya keuangan merupakan penentu dalam pembiayaan implementasi program dan kegiatan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan sampah. Ketersediaan dana yang mencukupi untuk pembiayaan program

pengembangan kinerja pengelolaan persampahan akan memberikan dampak pada suatu pencapaian tujuan implementasi program. Sumber daya lain yang merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah adalah sarana persampahan. Dengan adanya sarana persampahan yang memadai, maka akan menunjang pelaksanaan program pengelolaan sampah sehingga tujuan implementasi kebijakan akan tercapai.

Sikap pelaksana kebijakan (disposisi) akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana kebijakan harus mempunyai sikap dan komitmen terhadap program dan kegiatan untuk keberhasilan implementasi kebijakan, terutama aparatur pemerintah yang menjadi pelaksana kebijakan. Struktur birokrasi juga akan mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan, yaitu pembagian tugas dan wewenang terhadap anggota organisasi. Pembagian tugas dan tupoksi yang baik dalam suatu organisasi akan memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, apabila struktur birokrasi berjalan dengan baik maka implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mendalaminya melalui penelitian ini dengan mencari dan mendapatkan teori-teori yang dapat memberikan solusi untuk mengimplemntasikan kebijakan mengenai pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun. Karena konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah meliputi pengorganisasian, penafsiran dan penerapan dalam pengelolaan sampah diperkotaan, maka peneliti memfokuskan pada pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah pada aspek kelembagaan yang menjadi

penanggung jawab pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun yaitu Badan Kebersihan dan Pertamanan.

Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III tentang empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yang peneliti anggap dapat menggambarkan permasalahan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. Keempat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Sehubungan dengan hal ini, dirasa perlu untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kabupaten Karimun”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian seperti yang dijelaskan pada latar belakang permasalahan, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun?
2. Apakah sumber daya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun?
3. Apakah disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun?
4. Apakah struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun?
5. Apakah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan pokok yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh komunikasi secara partial terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.
2. Menganalisis pengaruh sumberdaya secara partial terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.
3. Menganalisis pengaruh disposisi secara partial terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.
4. Menganalisis pengaruh struktur birokrasi secara partial terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.
5. Menganalisis pengaruh komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi secara simultan terhadap implementasi kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi dinas/instansi/lembaga lain baik pemerintah maupun swasta yang terkait dengan masalah-masalah pengelolaan sampah.

2. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu Administrasi Publik, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap implementasi kebijakan publik yang terkait dengan pengelolaan sampah.



BAB II

TNJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Publik

Istilah kebijakan dalam bahasa Inggris *policy* yang dibedakan dari kata *wisdom* yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Kebijakan merupakan pernyataan umum perilaku daripada organisasi. Menurut pendapat Alfonsus Sirait dalam bukunya *Manajemen* mendefinisikan kebijakan, sebagai berikut: “Kebijakan merupakan garis pedoman untuk pengambilan keputusan” (Sirait, 1991:115). Kebijakan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan juga merupakan penyederhanaan system yang dapat membantu dan mengurangi masalah-masalah dan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah tertentu, oleh sebab itu suatu kebijakan dianggap sangat penting.

Wiliiam N. Dunn menyebut istilah kebijakan publik dalam bukunya yang berjudul *Analisis Kebijakan Publik*, pengertiannya sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah” (Dunn, 2013:132).

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan. Kebijakan publik yang dimaksud dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Suatu kebijakan apabila telah dibuat, maka harus diimplementasikan

untuk dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, serta dievaluasikan agar dapat dijadikan sebagai mekanisme pengawasan terhadap kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Edward III dan Sharkansky mengemukakan kebijakan publik adalah:

“What government say and do, or not to do, it is the goals or purpose of government programs. (apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah)” (Dalam Widodo, 2001:190).

Pendapat Edward III dan Sharkansky mengisyaratkan adanya apa yang dilakukan atau tidak dilakukan. Hal ini berkaitan dengan tujuan dan sasaran yang termuat dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah. Miriam Budiardjo mengemukakan pengertian kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu (Budiardjo, 2000:56). Berdasarkan pengertian di atas, kebijakan merupakan suatu kumpulan keputusan. Keputusan tersebut diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik yaitu pemerintah. Keputusan tersebut berusaha untuk memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

Inu Kencana Syafie dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Ilmu Pemerintahan* mengutip pendapat Harold Laswell, kebijakan adalah:

“Tugas intelektual pembuatan keputusan meliputi penjelasan tujuan, penguraian kecenderungan, penganalisaan keadaan, proyeksi pengembangan masa depan dan penelitian, penilaian dan penelitian, serta penilaian dan pemilihan kemungkinan” (Syafie, 1992:35 Dalam Muchsin dan Fadillah : 23).

Menurut pendapat Harold Laswell tersebut, kebijakan diartikannya sebagai tugas intelektual pembuat keputusan yang meliputi berbagai hal yaitu penjelasan mengenai tujuan yang ingin dicapai dari suatu kebijakan yang telah dibuat, penguraian kecenderungan untuk memilih beberapa tujuan yang sesuai dengan keadaan, pengembangan dampak dan kinerja kebijakan di masa depan, serta melakukan penelitian dan evaluasi. Adapun David Easton, sebagaimana yang dikutip oleh Muchsin dan Fadillah Putra dalam buku *Hukum dan Kebijakan Publik*, mendefinisikan kebijakan publik adalah sebuah proses pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah (Dalam Muchsin dan Fadillah, 2002:23).

Kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai sifat “paksaan” yang secara potensial sah dilakukan. Sifat memaksa ini tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi-organisasi swasta. Hal ini berarti bahwa kebijakan publik menuntut ketaatan yang luas dari masyarakat. Sifat inilah yang membedakan kebijakan publik dengan kebijakan lainnya. Pemahaman ini, pada sebuah kebijakan umumnya harus dilegalisasikan dalam bentuk hukum, dalam bentuk Peraturan Daerah misalnya. Sebab, sebuah proses kebijakan tanpa adanya legalisasi dari hukum tentu akan sangat lemah dimensi operasionalisasi dari kebijakan publik tersebut. Perlu diperhatikan, kebijakan publik tidaklah sama dengan hukum, walaupun dalam sasaran praktis di lapangan kedua-duanya sulit dipisah-pisahkan.

2. Implementasi Kebijakan Publik

Program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Hersel Nogi S. Tangkilisan mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang berjudul *Kebijakan Publik yang Membumi* bahwa:

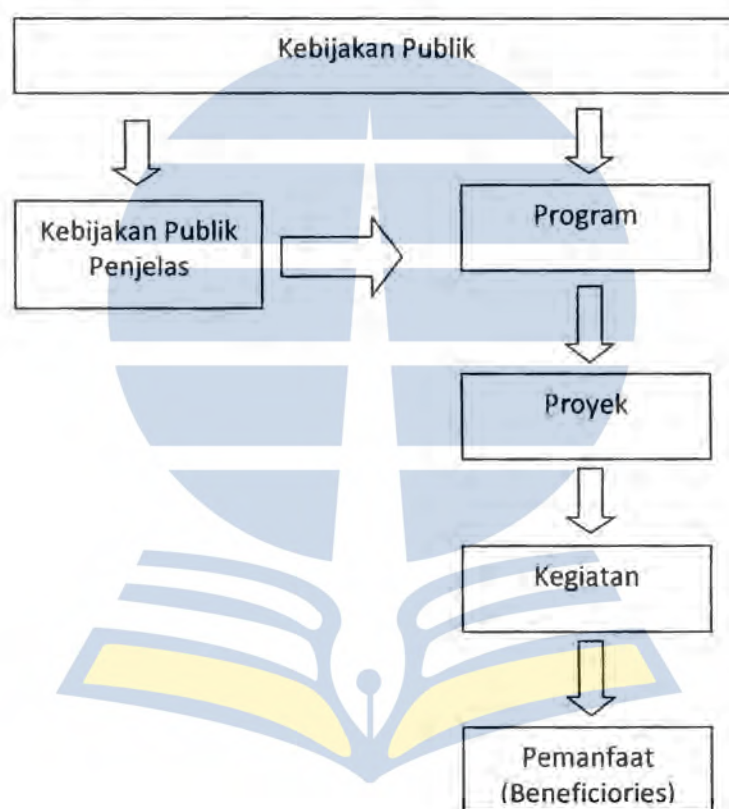
”Implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (Dalam Tangkilisan, 2003:9).

Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu mengatur secara efektif dan efisien sumber daya, unit-unit dan teknik yang dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah bagi relisasi program yang dilaksanakan. Menurut Dunn (2013:132), implementasi kebijakan (*policy implementation*) adalah pelaksanaan pengendalian aksi-aksi kebijakan di dalam kurun waktu tertentu

Riant Nugroho dalam bukunya yang berjudul *Publik Policy* mengemukakan bahwa:

“Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplemntasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut” (Nugroho, 2014:618).

Implementasi kebijakan menurut pendapat di atas, tidak lain berkaitan dengan cara agar kebijakan dapat mencapai tujuan. Kebijakan publik tersebut diimplementasikan melalui bentuk program-program serta melalui turunan. Turunan yang dimaksud adalah dengan melalui proyek intervensi dan kegiatan intervensi. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Sekuensi / Rangkaian Implementasi Kebijakan

Menurut Darwin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan proses implementasi yang perlu dilakukan, setidaknya terdapat empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu pendayagunaan sumber, pelibatan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi,

manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik (Widodo, 2001:194).

Agar suatu kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka persiapan proses implementasi kebijakan harus mendayagunakan sumber yang ada, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, menginterpretasikan kebijakan, program yang dilaksanakan harus direncanakan dengan manajemen yang baik, dan menyediakan layanan dan manfaat pada masyarakat. Sehubungan dengan faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan suatu program, menurut G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli (dalam Subarsono 2005:101), mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kondisi lingkungan. Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, lingkungan tersebut mencakup lingkungan sosio cultural serta keterlibatan penerima program.
2. Hubungan antar organisasi. Implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program. Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non human resources*).

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Maksudnya adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi dimana semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program

Berdasarkan faktor di atas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk mengimplementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program. Sehingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kinerja dan dampak dari suatu program yaitu sejauh mana program tersebut dapat mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

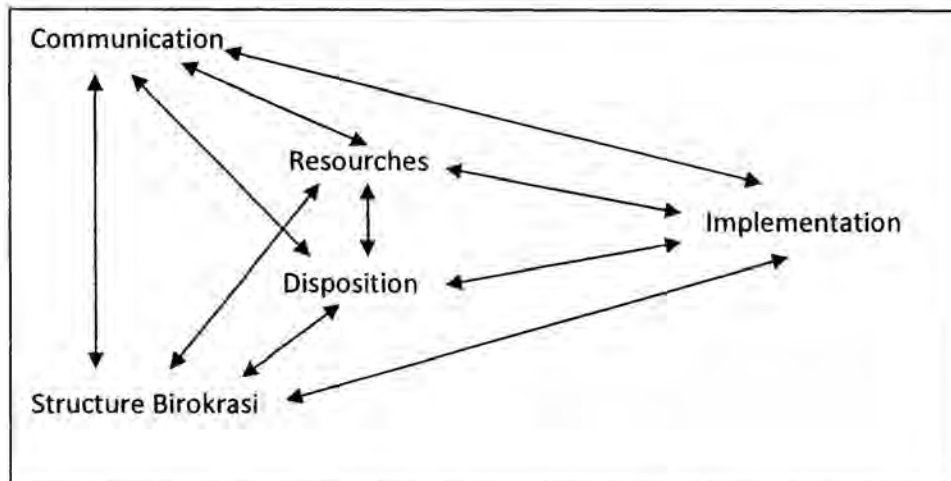
a. Model Implementasi Kebijakan Publik

1) Model George C Edward III

Edward III (1980:9) dalam Tahir (2015:61), mengemukakan:

“In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the precondition for succesfull policy implementation?” (di dalam pendekatan study implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan public dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan public.

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edward III (1980) menawarkan dan mempertimbngkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan public, yaitu : Communication (komunikasi), Resourches (sumber daya), Dispotition or Attitude (sikap pelaksana) , and Bureucratic Structure (struktur birokrasi). (Tahir : 2015 : 61). Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Edward III

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi (Mulyadi: 2015 :68). Selanjutnya Tahir (2015:63) menambahkan bahwa faktor komunikasi ini menunjukkan peranan sebagai acuan agar pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Artinya bahwa komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga pelaksanaan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat dan konsisten.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator tidak mempunyai sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yaitu kompetensi implementator, dan sumberdaya financial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi

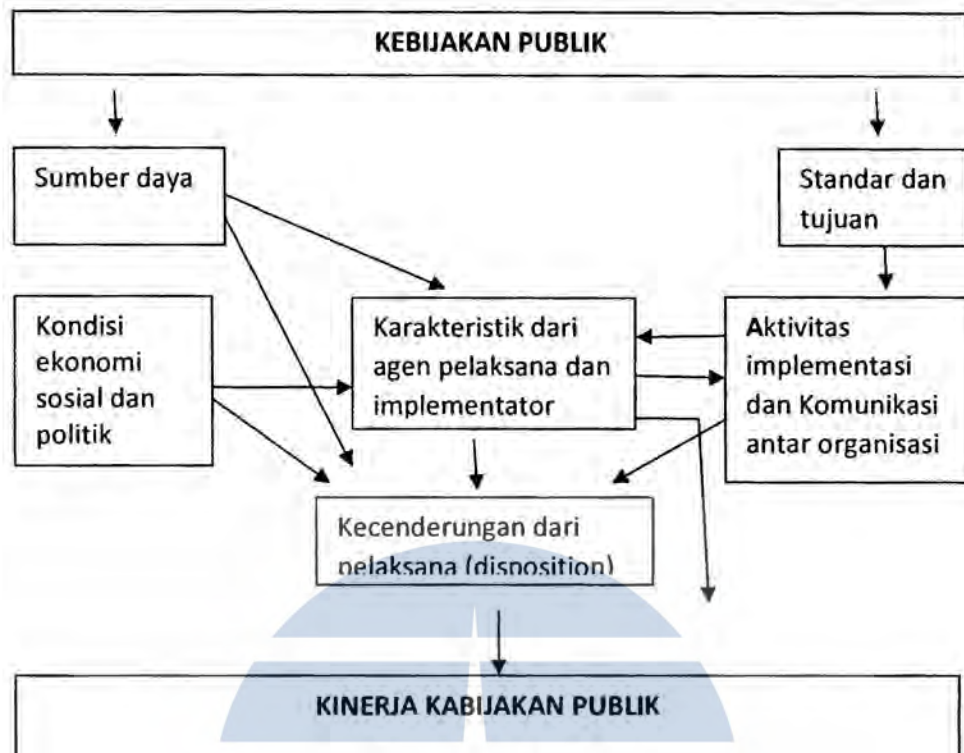
kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. (Mulyadi : 2015 : 68)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila implementator mempunyai disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan, sehingga implementasi kebijakan menjadi efektif. Sedangkan struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan, salah satunya adalah prosedur operasi yang standar (Standar Operating Procedure atau SOP). (Mulyadi : 2015 : 68 -69)

2) Model Donal Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005: 99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu : 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik, 6) sikap para pelaksana. Variabel-variabel kebijakan bersangkutan paut dengan tujuan-tujuan yang telah digariskan.

Van meter dan Van Horn dalam teorinya beranjak dari suatu argument bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya mereka menawarkan suatu pendekatan yang mencoba untuk menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja (performance). (Tahir, 2015 : 73). Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.3. Model Implementasi Donal Van Meter dan Van Horn

3) Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Subarsono, 2005: 94), menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Variabel independen, yaitu mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indicator dukungan teori dan teknologi, keragaman perilaku kelompok sasaran, tingkat perubahan perilaku yang dikehendaki. Variabel ini disebut juga karakteristik dari masalah.
2. Variabel intervening, yaitu variable kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dengan indicator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketetapan alokasi

sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat dan keterbukaan kepada pihak luar, variable ini disebut juga dengan karakteristik kebijakan.

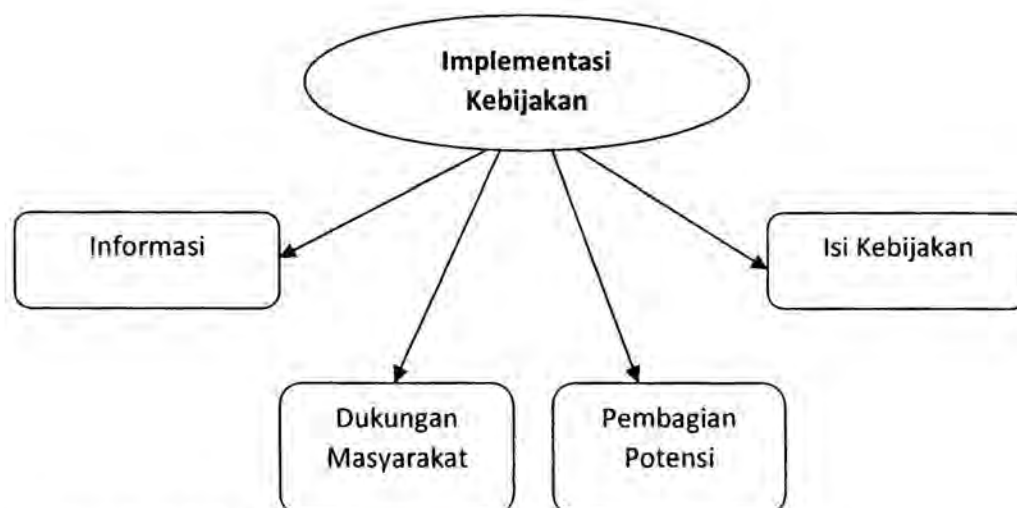
3. Variable di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi atau lingkungan, yang berkenaan dengan indicator konsisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan public, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

4) Model Implementasi Kebijakan Jan Merse

Model implementasi yang dikemukakan oleh Jan Merse dalam Koryati, 2004:16 (dalam Tahir, 2015:93), menegaskan bahwa:

“Model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: 1) informasi, 2) isi kebijakan, 3) dukungan masyarakat (fisik dan non fisik), dan 4) pembagian potensi. Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat sebagai salah satu stakeholder dalam proses pelaksanaan program.”

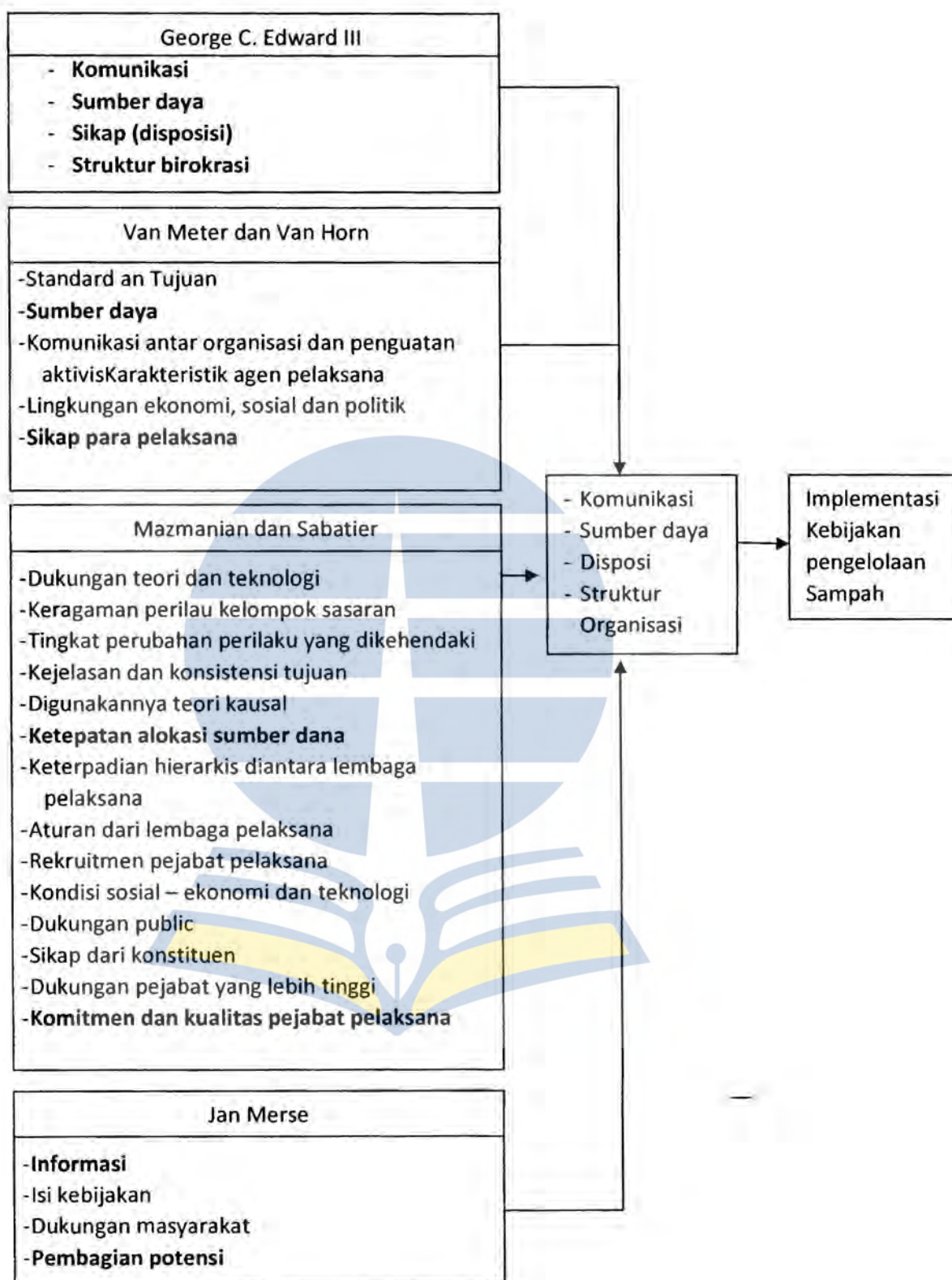
Penegasan diatas membuktikan bahwa karena pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap implementasi kebijakan dalam program pembangunan, maka setiap implementasi program tetap membutuhkan dukungan masyarakat sebagai stakeholder. Untuk jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2.4. Model Implementasi Kebijakan Jan Merse

Dari model implementasi kebijakan yang telah dijelaskan diatas, jika dilihat dari jenis kebijakan yaitu Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Balai Karimun, maka variabel yang diduga sangat berpengaruh dalam implementasi adalah komunikasi, sumber daya dan partisipasi masyarakat (dukungan masyarakat). (Tahir, 2015:93). Secara umum sekema teori-teori yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat pada gambar berikut;





Gambar 2.5.

Skema Teori Variabel-variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Balai Karimun

Kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Karimun berupa Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah merupakan produk hukum pemerintah. Oleh karena itu untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tersebut perlu dilihat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, yaitu Badan Kebersihan Dan Pertamanan. Dengan demikian, jika dilihat dari skema teori variabel-variabel yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Balai Karimun (Gambar 2.5.), maka teori yang variabelnya mendukung pada lembaga pemerintah adalah teori Edwar III, yaitu faktor-faktor kritis pelaksana kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3. Komunikasi

Menurut George C. Edwards III, komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi mempunyai peranan penting sebagai acuan pelaksanaan kebijakan agar mengetahui persis apa yang akan dikerjakan, artinya komunikasi juga dinyatakan dengan perintah dari atasan terhadap pelaksanaan kebijakan, sehingga komunikasi harus dinyatakan dengan jelas, cepat dan konsisten.

Edward III dalam Widodo (2012:97), menjelaskan bahwa dalam komunikasi harus terdapat tiga hal yang penting atau yang disebut dengan dimensi, yaitu dimensi transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*). Dimensi konsistensi menghendaki agar kebijakan public disampaikan tidak hanya kepada pelaksana (*implementator*) kebijakan, tetapi juga disampaikan

kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkeentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkn serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Dimensi konsistensi (*consistency*) diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Secara terminologis, komunikasi berarti proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa komunikasi melibatkan sejumlah orang dimana seseorang menyatakan sesuatu kepada orang lain. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi manusia atau dalam bahasa asing *humancommunication* yang sering pula disebut komunikasi sosial atau *social communication*. Komunikasi manusia sebagai singkatan dari komunikasi antar manusia dinamakan komunikasi sosial atau komunikasi kemasyarakatan karena hanya pada manusia-manusia yang bermasyarakat komunikasi dapat terjadi. Masyarakat terbentuk dari paling sedikit duaorang yang saling berhubungan dengan komunikasi sebagai penjalannya. Komunikasi dapat dilakukan secara langsung maupun menggunakan media. Contoh komunikasi langsung tanpa media adalah percakapan tata muka, pidato tatap muka dan lain-lain sedangkan contoh komunikasi menggunakan media

adalah berbicara melalui telepon, mendengarkan. berita lewat radio atau televisi dan lain-lain.

Menurut Effendy (2003: 8), komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk perubahan sikap (*attitude change*), perubahan pendapat (*opinion change*), perubahan perilaku (*behaviour change*) dan perubahan sosial (*social change*). Sedangkantujuan komunikasi menurut Cangara (2002: 22) adalah sebagai berikut:

- a. Supaya Yang Disampaikan Dapat Dimengerti, Seorang komunikator harus dapat menjelaskan kepada komunikan dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga dapat mengikuti apa yang dimaksud oleh pembicara atau penyampai pesan
- b. Memahami Orang sebagai komunikator harus mengetahui benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkannya dan tidak berkomunikasi dengan kemauan sendiri
- c. Supaya gagasan dapat diterima orang lain. Komunikator harus berusaha agar gagasan dapat diterima oleh orang lain dengan menggunakan pendekatan yang persuasif bukan dengan memaksakan kehendak
- d. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menggerakkan sesuatu itu dapat berupa kegiatan yang lebih banyak mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang kita kehendak

Menurut Effendy (2003: 8), komunikasi berfungsi untuk menyampaikan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*), dan mempengaruhi (*to influence*). Agar komunikasi berlangsung efektif, komunikator harus tahu khalayak mana yang akan dijadikan sasaran dan tujuan yang diinginkannya. Komunikator harus terampil dalam membuat pesan agar

komunikasikan dapat menangkap pesanyang disampaikan komunikator dan untuk menciptakan komunikasi yang efektif maka pesan dalam komunikasi harus berhasil menumbuhkan responkomunikasikan yang dituju.

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia dan dengan adanya komunikasi yang baik maka suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya apabila kurang atau tidak adanya komunikasi maka organisasi akan macet atau berantakan. Komunikasiorganisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan-hubungan hierarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan. Komunikasi organisasi terjadi kapan pun jugasetidak-tidaknya terdapat satu orang yang menduduki suatu jabatan dalam suatu organisasi yang menafsirkan suatu pertunjukan pesan (Pace dan Don F, 2005: 31).

Menurut Goldhaber (1986: 14), komunikasi organisasi adalah prosesmenciptakan dan menukar pesan dalam suatu jaringan hubungan yangsaling tergantung satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang seringberubah-ubah. Komunikasi organisasi mempunyai peranan penting dalam memadukan fungsi-fungsi manajemen dalam suatu perusahaan yaitu :

1. Menetapkan dan menyebarluaskan tujuan perusahaan
2. Menyusun rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
3. Melakukan pengorganisasian terhadap sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dengan cara efektif

4. Memimpin, mengarahkan, memotivasi dan menciptakan iklim yang menimbulkan keinginan orang untuk memberikan kontribusi
5. Mengendalikan prestasi (dalam Purba, 2006: 112)

Menurut Sriussadaporn-Charoenngam, Nongluck dan Fredric M Jabin (dalam Mas'ud, 2004: 74), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur komunikasi dalam organisasi yaitu :

1. Bijaksana dan Kesopanan, yaitu berkomunikasi dengan menggunakan pilihan kata yang tepat dan disampaikan dengan bahasa yang sopan dan halus
2. Penerimaan Umpan Balik, yaitu penerimaan tanggapan dari pesan atau isi pesan yang disampaikan
3. Berbagi Informasi, yaitu memberikan informasi baik informasi kemajuan maupun permasalahan yang ada kepada rekan sekerja maupun pimpinan
4. Memberikan Informasi Tugas, yaitu menyampaikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas
5. Mengurangi Ketidakpastian Tugas, yaitu menyampaikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai pelaksanaan tugas agar tugas dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan

Komunikasi internal yang berkaitan dengan organisasi didefinisikan oleh Lawrence D Brennan (dalam Effendy, 2003: 122) sebagai pertukaran gagasan diantara para pimpinan dan pegawai dalam suatu organisasi dan lengkap dengan strukturnya yang khas serta adanya pertukaran gagasan secara horisontal dan vertikal di dalam organisasi yang menyebabkan pekerjaan berlangsung. Organisasi sebagai kerangka keorganisasian menunjukkan adanya pembagian tugas antara orang-orang di dalam organisasi yang dapat diklasifikasikan sebagai tenaga pimpinan

dan tenaga yang dipimpin. Untuk menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan tujuan yang akan dicapai pimpinan, dibuat peraturan sedemikian rupa sehingga pimpinan tidak perlu berkomunikasi langsung dengan seluruh karyawan. Pimpinan membuat kelompok-kelompok menurut jenis pekerjaannya dan mengangkat seseorang sebagai penanggung jawab atas kelompoknya dimana jumlah kelompok serta besarnya kelompok tergantung pada besar kecilnya organisasi.

Organisasi adalah komposisi sejumlah orang yang menduduki posisi atau peranan tertentu. Sejumlah orang tersebut saling bertukar pesan dan pertukaran pesan tersebut dilakukan melalui jalan tertentu yang disebut dengan jaringan komunikasi. Suatu jaringan komunikasi berbeda dalam besar dan strukturnya misalnya mungkin hanya di antara dua orang, tiga atau lebih dan mungkin juga di antara keseluruhan orang dalam organisasi. Menurut Muhammad (2007: 107), jaringan komunikasi organisasi terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Jaringan Komunikasi Formal. Pesan yang mengalir melalui jalan resmi dan ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan, maka pesan tersebut merupakan jaringan komunikasi formal. Terdapat tiga bentuk utama dari arus pesan dalam jaringan komunikasi formal yang mengikuti garis komunikasi yaitu komunikasi dari bawahan kepada atasan, komunikasi dari atasan kepada bawahan, dan komunikasi sesama karyawan yang sama tingkatnya.
2. Jaringan Komunikasi Informal. Pegawai yang berkomunikasi dengan yang lainnya tanpa memperhatikan posisi dalam organisasi, maka pengarahannya bersifat pribadi. Jaringan komunikasi tersebut lebih dikenal dengan desas-desus atau kabar angin. Informasi yang diperoleh dari desas-desus adalah

yang berkenaan dengan apa yang didengar atau apayang dikatakan orang dan bukan apa yang diumumkan oleh yang berkuasa. Pesan yang mengalir melalui jalan resmi yang ditentukan oleh hierarki resmi organisasi atau oleh fungsi pekerjaan merupakan pesan dalam jaringan komunikasi formal. Pesan dalam jaringan komunikasi formal biasanya mengalir dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau dari tingkat yang sama atau secara horizontal.

Menurut Gibson et al (1997:57), terdapat tiga jenis komunikasi formal dalam organisasi, yaitu :

1. Komunikasi Horizontal (Komunikasi Lateral/Menyamping). Merupakan bentuk komunikasi secara mendatar dimana terjadi pertukaran pesan secara menyimpang dan dilakukan oleh dua pihak yang mempunyai kedudukan yang sama, posisi yang sama, jabatan yang *se-level* maupun eselon yang sama dalam suatu organisasi. Menurut Daft (2003: 148), komunikasi bentuk ini selain berguna untuk menginformasikan juga untuk meminta dukungan dan mengkoordinasikan aktivitas. Komunikasi horizontal diperlukan untuk menghemat waktu dan memudahkan koordinasi sehingga mempercepat tindakan (Robbins, 1996: 9). Kemudahan koordinasi initerjadi karena adanya tingkat, latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang relatif sama antara pihak-pihak yang berkomunikasi serta adanya struktur formal yang tidak ketat.

2. Komunikasi Diagonal. Merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihaklain dalam posisi yang berbeda, dimana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama. Komunikasi diagonal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang berbeda tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Komunikasi diagonal merupakan saluran komunikasi

yang jarang digunakan dalam organisasi, namun penting dalam situasi dimana anggota tidak dapat berkomunikasi secara efektif melalui saluran-saluran lain. Penggunaankomunikasi ini selain untuk menanggapi kebutuhan dinamika lingkungan organisasi yang rumit juga akan mempersingkat waktu dan memperkecil upaya yang dilakukan oleh organisasi (Gibson et al, 1997: 59).

3. Komunikasi Vertikal. Merupakan komunikasi yang terjadi antara atasan dan bawahan dalam organisasi. Robbins (1996: 8), menjelaskan bahwa komunikasi vertical adalah komunikasi yang mengalir dari satu tingkat dalam suatu organisasi ke suatu tingkat yang lebih tinggi atau tingkat yang lebih rendah secara timbal balik. Dalam lingkungan organisasi, komunikasi antara atasan dan bawahan menjadi kunci penting kelangsungan hidup suatu organisasi. Menurut Stonner dan Freeman (1994: 158), dua pertiga dari komunikasi yang dilakukan dalam organisasi berlangsung secara vertikal antara atasan dan bawahan sehingga peran komunikasi vertikal sangat penting dalam suatu organisasi. Pada dasarnya, komunikasi vertikal memiliki dua pola, yaitu :

a. Komunikasi Ke Atas (*Upward Communication*). Komunikasi ke atas mengacu pada pesan atau informasi yang dikirim dari tingkat bawah ke tingkat atas dalam hirarki organisasi. Parapegawai menggunakan saluran komunikasi ini sebagai kesempatan untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang mereka ketahui dan membantu para pegawai untuk menerima jawaban yang lebih baik tentang masalah dan tanggung jawabnya (Mulyana, 2005: 103).

Komunikasi ke atas mempunyai beberapa fungsi, yaitu :

1. Pimpinan dapat mengetahui kapan bawahannya siap untuk diberi informasi dan pimpinan dapat mempersiapkan diri menerima apa yang disampaikan bawahannya

2. Pimpinan memperoleh informasi yang berharga dalam pembuatan keputusan
3. Komunikasi ke atas dapat memperkuat apresiasi dan loyalitas pegawai terhadap organisasi dengan jalan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengajukan pertanyaan, ide dan saran tentang jalannya organisasi
4. Komunikasi ke atas dapat mendorong munculnya desas desus dan memberikan kesempatan bagi pimpinan untuk mengetahuinya
5. Komunikasi ke atas memberikan petunjuk bagi pimpinan apakah pegawainya menangkap arti dari komunikasi ke bawah yang dilakukannya
6. Komunikasi ke atas membantu pegawai mengatasi masalah masalah pekerjaan dan memperkuat keterlibatan pegawai dalam tugas-tugasnya dan organisasi (Muhammad, 2007: 117).

Beberapa informasi yang harus diperoleh pimpinan dari pegawainya dalam komunikasi ke atas adalah :

- a. Apa yang dilakukan pegawai, bagaimana pekerjaanya, hasil yang dicapainya, kemajuan mereka dan rencana masa yang akan datang
- b. Menjelaskan masalah-masalah pekerjaan yang tidak terpecahkan yang mungkin memerlukan bantuan tertentu
- c. Menawarkan saran atau ide bagi penyempurnaan unitnya masingmasing ataupun organisasi secara keseluruhan
- d. Menyatakan bagaimana pikiran dan perasaan mereka mengenai pekerjaan, teman sekerja dan organisasi (Muhammad, 2007:118).

Kenyataannya, informasi tersebut di atas tidak disampaikan pegawai kepada pimpinannya. Menurut Sharma (dalam Muhammad, 2007:118), kesulitan menyampaikan informasi tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu :

- a. Kecenderungan pegawai untuk menyembunyikan perasaan dan pikirannya. Hasil studi memperlihatkan bahwa pegawai merasa bahwa mereka akan mendapat kesukaran apabila menyatakan apa yang sebenarnya menurut pikiran mereka, sehingga cara yang terbaik adalah mengikuti saja apa yang disampaikan pimpinannya
- b. Pegawai beranggapan bahwa pimpinan tidak tertarik pada masalah mereka. Pimpinan bisa saja tidak memberikan respon terhadap masalah pegawainya bahkan menahan komunikasi ke atas, hal ini dilakukan agar pimpinan tetap memiliki pandangan yang baik dari atasan yang lebih tinggi
- c. Kurangnya penghargaan terhadap pegawai yang melaksanakan komunikasi ke atas. Seringkali pimpinan tidak memberikan penghargaan yang nyata kepada pegawai untuk memelihara keterbukaan komunikasi ke atas
- d. Pegawai beranggapan bahwa pimpinan mereka tidak dapat menerima dan merespon terhadap apa yang dikatakan oleh mereka. Pimpinan terlalu sibuk untuk mendengarkan atau pegawai susah untuk menemuinya

Kombinasi dari perasaan dan kepercayaan pegawai tersebut menjadi penghalang yang kuat bagi pegawai untuk menyatakan ide, pendapat atau informasi kepada atasan. Selain sulitnya melaksanakan komunikasi ke atas, komunikasi yang disampaikan juga belum tentu efektif karena dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu :

- a. komunikasi ke atas lebih mudah digunakan oleh pembuat keputusan pengelolaan apabila pesan tersebut disampaikan tepat waktu
- b. Komunikasi ke atas yang bersifat positif lebih mungkin digunakan oleh pembuat komunikasi yang bersifat negatif

c. Komunikasi ke atas akan lebih mungkin diterima apabila pesan tersebut mendukung kebijaksanaan yang baru

d. Komunikasi ke atas mungkin akan lebih efektif apabila komunikasi itu langsung kepada penerima yang berkaitan dengan pesan yang disampaikan

e. Komunikasi ke atas akan lebih efektif apabila komunikasi tersebut mempunyai daya tarik bagi penerima pesan

b. Komunikasi Ke Bawah (*Downward Communication*) . Menurut Lewis (dalam Muhammad, 2007: 108), komunikasi ke bawah dilakukan untuk menyampaikan tujuan, untuk merubah sikap, membentuk pendapat, mengurangi ketakutan dan kecurigaan yang timbul karena salah informasi, mencegah kesalahpahaman karena kurang informasi dan mempersiapkan anggota organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan.

Secara umum, Muhammad (2007: 108) menyebutkan bahwa komunikasi ke bawah dapat diklasifikasikan atas lima tipe yaitu :

1. Instruksi Tugas. Merupakan pesan yang disampaikan kepada bawahan mengenai apa yang diharapkan dilakukan mereka dan bagaimana melakukannya. Pesan tersebut bervariasi bisa berupa perintah langsung, deskripsi tugas, prosedur manual, program latihan tertentu, alat-alat bantu melihat dan mendengar yang berisi pesan-pesan tugas dan sebagainya.

2. Rasional. Merupakan pesan yang menjelaskan mengenai tujuan aktivitas dan bagaimana kaitan aktivitas tersebut dengan aktivitas lain dalam organisasi. Kualitas dan kuantitas dari komunikasi rasional ditentukan oleh filosofi dan asumsi pimpinan mengenai bawahannya. Apabila pimpinan menganggap bawahannya pemalas atau hanya mau bekerja apabila dipaksakan maka pimpinan

memberikan pesan yang bersifat rasional ini sedikit. Tetapi apabila pimpinan menganggap bawahannya merupakan orang yang dapat memotivasi diri sendiri dan produktif maka biasanya diberikan pesan rasional yang banyak.

3. Ideologi. Merupakan perluasan dari pesan rasional dimana dalam pesan rasional terdapat penjelasan tugas dan kaitannya dengan persektif organisasi sedangkan pada pesan ideologi lebih pada mencari sokongan dan antusias dari anggota organisasi guna memperkuat loyalitas, moral dan motivasi.

4. Informasi. Pesan informasi dimaksudkan untuk memperkenalkan bawahannya dengan praktik-praktik organisasi, peraturan-peraturan organisasi, keuntungan, kebiasaan dan data lain yang tidak berhubungan dengan instruksi dan rasional. Contoh dari pesan informasi adalah buku *handbook*.

5. Balikan. Merupakan pesan yang berisi informasi mengenai ketepatan individu dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu bentuk sederhana dari balikan ini adalah pembayaran gaji karyawan yang telah siap melakukan pekerjaannya atau apabila tidak ada informasi dari atasan yang mengkritik pekerjaannya berarti pekerjaannya sudah memuaskan. Sebaliknya apabila hasil pekerjaan karyawan kurang baik maka balikan yang diberikan mungkin berupa kritikan atau peringatan terhadap karyawan tersebut.

Semua bentuk komunikasi ke bawah tersebut dipengaruhi oleh struktur hierarki dalam organisasi. Pesan ke bawah cenderung bertambah karena pesan tersebut bergerak melalui tingkatan hierarki secara berturut-turut. Hal yang perlu diperhatikan juga dalam komunikasi ke bawah adalah pimpinan hendaknya mempertimbangkan saat yang tepat bagi pengiriman pesan dan dampak yang potensial kepada tingkah laku pegawai.

Menurut Katz dan Kahn (dalam Pace dan Don F, 2005: 185), terdapat lima jenis informasi yang biasa dikomunikasikan kepada bawahan, yaitu :

1. Informasi bagaimana melakukan pekerjaan
2. Informasi mengenai dasar pemikiran untuk melakukan pekerjaan
3. Informasi mengenai kebijakan dan praktik-praktik organisasi
4. Informasi mengenai kinerja pegawai
5. Informasi untuk mengembangkan rasa memiliki tugas

Menurut Liliweri (2004: 86), terdapat beberapa masalah yang harus diperhatikan dalam melaksanakan komunikasi ke bawah yaitu :

- a. Pimpinan tidak terlalu paham mengenai *downward communication* sehingga pimpinan memberikan instruksi secara alamiah saja tanpa banyak menjelaskan secara rinci sehinggaterjadi umpan balik yang tidak dikehendaki dan hanya didiamkan saja
- b. Pesan tidak lengkap dan tidak jelas
- c. Kelebihan pesan membuat orang menjadi bingung
- d. Pesan melewati banyak bagian yang tidak memiliki persepsi yang sama terhadap pesan

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, Davis (dalam Muhammad, 2007: 112) memberikan beberapa saran dalam melaksanakan komunikasi ke bawah, yaitu:

- a. Pimpinan hendaklah sanggup memberikan informasi kepada pegawainya apabila dibutuhkan. Apabila pimpinan tidak memiliki informasi yang dibutuhkan, pimpinan perlu mengatakanscara terus terang dan berjanji akan mencarikan jawabannya

- b. Pimpinan hendaklah membagi informasi yang dibutuhkan oleh pegawainya
- c. Pimpinan hendaklah mengembangkan suatu perencanaan komunikasi sehingga pegawai dapat mengetahui informasi yang diharapkannya
- d. Pimpinan hendaklah berusaha membentuk kepercayaan diantara pengirim dan penerima pesan. Kepercayaan ini akan mengarahkan kepada komunikasi terbuka yang akan mempermudah adanya persetujuan antara pegawai dan pimpinannya.

4. Sumber Daya

Dalam implementasi kebijakan, faktor sumber daya mempunyai peranan penting. Menurut Edward III, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan dan sumber daya kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variable yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Ada tiga hal penting yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia yaitu kecakapan, fisik dan mental. Ketiganya harus diperankan secara terpadu. Kemampuan aparatur pelaksana menurut Thoha (1993 :154) diidentifikasi sebagai berikut : Kemampuan adalah suatu kondisi yang menunjukkan unsur kematangan yang berkaitan pula dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dapat diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengetahuan.

Fungsi sumber daya manusia menurut Cahyono (1996) terbagi atas fungsi manajemen yang meliputi planning,organizing, actuating,controlling. Fungsi kedua adalah fungsi operasional yang meliputi procedurement, development, komposisi, integrasi, maintenance dan separation. Gibson (1997) mengemukakan bahwa kemampuan unsur pelaksana untuk dapat mencapai hasil secara efisien dan efektif adalah :

1. Kemampuan interaksi
2. Kemampuan konseptual
3. Kemampuan administrasi

Selanjutnya Gibson menyatakan bahwa “Kemampuan merupakan sifat yang dibawa sejak lahir atau yang dipelajari, yang memungkinkan seseorang menyelesaikan pekerjaannya (Gibson, 1997: 54). Selanjutnya Moenir menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan pegawai dalam hubungannya dengan pekerjaan ialah suatu keadaan pada diri seseorang yang secara penuh kesanggupan, berdaya guna, berhasil guna melaksanakan pekerjaannya sehingga menghasilkan sesuatu yang optimal (Moenir, 1983: 76). Sedangkan aparatur secara etimologis istilah aparatur berasal dari kata aparat, yakni alat, badan, instansi, pegawai negeri. Sedangkan aparatur disamakan artinya dengan aparat tersebut diatas, yakni dapat diartikan sebagai alat negara, aparat pemerintah. Jadi aparatur negara adalah alat kelengkapan negara yang bertanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari. (Situmorang; dan Sitanggang, 1994:113-114).

Thoha berpendapat bahwa “kemampuan merupakan salah satu unsur yang berkaitan dengan pengetahuan atau ketrampilan yang dapat diperoleh pegawai melalui pendidikan dan latihan atau pengalaman kerja”. Dalam hal ini kemampuan aparatur sangat tergantung pada pengetahuan, ketrampilan atau kecakapan. Adapun tingkat pengetahuan ini bisa dilihat melalui: a. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh. b. Pendidikan non formal seperti kursus, pelatihan, dan penataran. c. Pengalaman kerja. Sedangkan pada tingkat ketrampilan atau kecakapan bisa dilihat melalui: a. Cara pelaksanaan kerja. b.

Ketepatan waktu dalam pelaksanaan kerja. c. Hasil yang dicapai (Thoha, 1993: 34).

Berangkat dari pengertian di atas, maka secara keseluruhan pengertian dari kemampuan sumber daya manusia adalah menunjukkan apa yang dapat dilakukan oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tersedianya modal pengetahuan dan ketrampilan inilah yang merupakan salah satu faktor untuk mempertimbangkan penempatan seorang calon pegawai. Modal ini biasanya dimiliki oleh mereka yang berpendidikan. Ketrampilan dan pengetahuan ini sebagai pertanda adanya kemampuan sebagaimana pendapat diatas, ternyata dapat dialihkan dari orang yang satu kepada orang lain. Tidak lain medianya adalah melalui pendidikan

Sumber daya anggaran akan mempengaruhi pelaksanaan program. Menurut Edward III dalam Widodo (2010:100), terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Disamping itu terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementator merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Edward III dalam Widodo (2010:101) menyimpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan, yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102). Disamping

ketiga sumber daya diatas, Edward III dalam Widodo (2010:103) menambahkan bahwa sumber daya lain yang cukup penting adalah kewenangan. Edward III menyatakan bahwa:

Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

Oleh karena itu pelaku utama pelaksana kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

5. Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi yang dimaksudkan Edward III dalam Misroji (2014:49) adalah sikap para pelaksana kebijakan yang sangat berperan dalam upaya keberhasilan implementasi kebijakan sehingga sesuai dengan tujuan. Sikap tersebut antara lain jujur, komitmen dan bertanggung jawab. Sikap ini harus dimiliki oleh implementator agar dapat tetap berada dalam *track program* yang telah digariskan. Tanggung jawab dan komitmen pelaksana juga akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Pengertian disposisi menurut Edward III dalam Widodo (2010:104) adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dari kebijakan tersebut dapat diwujudkan. Edward III dalam Widodo (2010:204-205) menyatakan bahwa:

“Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (implementator) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus melaksanakan kebijakan tersebut.”

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan adalah:

- 1) Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan masyarakat.
- 2) Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

6. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan sistem hubungan formal antara tugas dan wewenang yang mengendalikan serta mengkoordinasikan sumber daya untuk mencapai tujuan. (Jones, 2004:8 dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:130). Dalam kegiatan implementasi kebijakan, struktur organisasi merupakan wadah atau wahana interaksi dimana para petugas, aparat birokrasi atau pejabat yang berwenang mengelola implementasi kebijakan dengan berbagai kegiatannya. Proses terbentuknya struktur organisasi merupakan serangkaian logika penyederhanaan kerja diantara anggotanya karena pekerjaan untuk mencapai misi organisasi tidak dapat dilakukan sendiri. Sebagai konsekuensi dari pembagian kerja tersebut maka diperlukan koordinasi diantara berbagai departemen, unit kerja

dan individu-individu yang memiliki tugas berbeda-beda. Dan terakhir dibutuhkan pengawasan (kontrol) untuk menjamin bahwa departemen, unit kerja, dan individu-individu yang diberi tugas tersebut menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan pnduan yang telah ditetapkan. (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:130)

Menurut Edward III dalam Widodo (2010:106), implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Edward III dalam Winarno (2014:206) menambahkan, terdapat dua karakteristik utama dari struktur birokrasi yaitu: prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar atau sering disebut dengan "*Standard Operational Procedere* (SOP) dan fragmentasi". SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internl akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Mulyadi (2015:68-69) menambahkan, salah satu dari aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak.

Edward III (1980:11) dalam Tahir (2015:70) menjelaskan:

"Even if sufficien resources to implement a policy exist and implementers know what to do and want to do it. Implementation may still be thwarted because of deficiencies in bureaucratic structure. Organizational fragmentation may hinder the coordination necessary to implement successfully a complex policy requiring the cooperation of many peope, and it may also waste searcce resources, inhibit change, create confition, lead to policies working at cross-purposes, and result in important functions being overllooded."

Meskipun sumber daya untuk mengimplemetasikan kebijakan telah mencukupi dan para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan serta bersedia melaksanakannya, implementasi kebijakan masih terhambat oleh

inefisiensi struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi dapat menghambat koordinasi yang diperlukan guna keberhasilan kompleksitas implementasi sebuah kebijakan yang membutuhkan kerja sama dengan banyak orang. Hal ini menyebabkan terbuangnya sumber daya yang langka, menutup kesempatan, menciptakan kebingungan, menggiring kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan tujuan silang, dan mengakibatkan fungsi-fungsi penting menjadi terlupakan. (Tahir, 2015:70-71).

Edward III dalam Winarno (2005:155) menjelaskan bahwa “fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi”. Edward III dalam Widodo (2010:106) mengatakan bahwa:

“Struktur birokrasi yang terfragmentasi (terpecah-pecah atau tersebar) dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, karena kesempatan untuk instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi dalam pelaksanaan kebijakan, semakin membutuhkan koordinasi yang intensif.”

7. Pengelolaan Sampah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 dijelaskan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan jenisnya, sampah terdiri dari: 1) Sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak dapat didegradasi atau diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik secara aerob maupun secara anaerob; 2) sampah organik, yaitu sampah yang dapat didegradasi atau diuraikan secara sempurna melalui proses biologi baik secara aerob maupun secara anaerob (Suwerda, 2012:11-12).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008, pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan

berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Adapun sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri dari sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga dan sampah spesifik. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pada pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013, dijelaskan tujuan diselenggarakannya pengelolaan sampah adalah : a) mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah; b) meningkatkan peran aktif masyarakat dan pelaku usaha dalam mengurangi dan menangani sampah berwawasan lingkungan; c) menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan d) meningkatkan pelayanan kebersihan. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dalam Peraturan daerah kabupaten karimun Nomor 7 tahun 2013 juga dijelaskan bahwa pengurangan sampah bertujuan untuk: a) membatasi timbulan sampah yang akan dibuang di TPS/TPST/TPS 3R;b) menjadikan sampah sumber daya seoptimal mungkin dan; c) memperpanjang masa pakai TPA. Pengurangan sampah dilakukan melalui kegiatan minimalisasi timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganan sampah meliputi pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagaimana terdapat pada Tabel 2.1:

Tabel 2.1.
Penelitian terdahulu Yang Relevan

| ASPEK | LA ODE AGUS SAID, MARDIONO, IRWAN NOOR (2015) | ANDRI NUGRAHA (2014) | MISROJI (2014) |
|-----------------------|---|--|--|
| JUDUL | Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau | Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi | Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok |
| LATAR BELAKANG | Munculnya Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Persampahan | Perilaku dan pola hidup masyarakat yang masih cenderung mengarah pada peningkatan timbulnya sampah karena tidak seimbangnya sumber daya yang ada dengan keadaan alam, sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan, oleh karena itu volume sampah yang ditimbulkan semakin meningkat. | Kurang maksimalnya pemanfaatan program Depok Cyber City |
| TUJUAN | Untuk dapat menemukan solusi berupa jawaban dan gambaran yang | Mengetahui apakah Dinas Kebersihan dan Pertamanan mengimplementasikan kebijakan | 1. Untuk mengetahui apakah komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi |

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| | <p>lengkap. Serta mengungkapkan persoalan yang sifatnya tidak terekspos secara realita dalam hal upaya apa saja yang dilakukan pemerintah Kota Baubau terhadap pengelolaan persampahan.</p> | <p>Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi, karena volume sampah dan masyarakat Kota Cimahi semakin tahun semakin meningkat</p> | <p>mengenai Depok Cyber City</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Untuk mengetahui apakah sumber daya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai Depok Cyber City 3. Untuk mengetahui apakah Disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai Depok Cyber City 4. Untuk mengetahui apakah komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai Depok Cyber City 5. Untuk mengetahui apakah komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi mengenai Depok Cyber City |
| INSTRUMEN PENELITIAN | Observasi, wawancara, dokumentasi | Observasi, wawancara, dokumentasi | Kuisisioner |
| TEORI YANG DIGUNAKAN | George Edward III | George Edward III | George Edward III |
| HASIL PENELITIAN | <p>Pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan dalam hal</p> | <p>Menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi cukup efektif tetapi belum maksimal.</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi secara partial berpengaruh |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>komunikasi yang dijalankan internal Dinas Kebersihan bagi pelaksanaan program belum berjalan optimal. Ketersediaan sumber daya memberikan pengaruh besar terhadap tercapainya ataupun tidaknya suatu kebijakan pengelolaan persampahan di Kota Baubau. Komitmen dari para pelaksana program terlihat memiliki rasa keleluasaan yang besar untuk mewujudkan dan mensukseskan program. Serta pelaksanaan program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan belum memiliki kejelasan standart yakni dengan penentuan standar operasional prosedur dalam menjalankan program.</p> | <p>Komunikasi yang dilakukan telah cukup maksimal tetapi masyarakat belum semua memahami dampak dari sampah. Sumber daya aparatur yang kurang untuk mengatasi sampah diseluruh Kota Cimahi, dan kendaraan oprasiaonal yang masih terbatas. Disposisi berpedoman kepada peraturanperaturan yang ada, akan tetapi masih adanya aparatur yang menjalankan tupoksi di luar peraturan-peraturan yang terkait masalah sampah di Kota Cimahi. Struktur birokrasi sudah terkoordinasi dengan baik, akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa aparatur yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP.</p> | <p>signifikan terhadap imolementasi kebijakan pengebaran informasi publik, sedangkan diaposisi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyebaran informasi publik.</p> <p>2. Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap imolementasi kebijakan pengebaran informasi publik</p> |
|--|---|---|--|

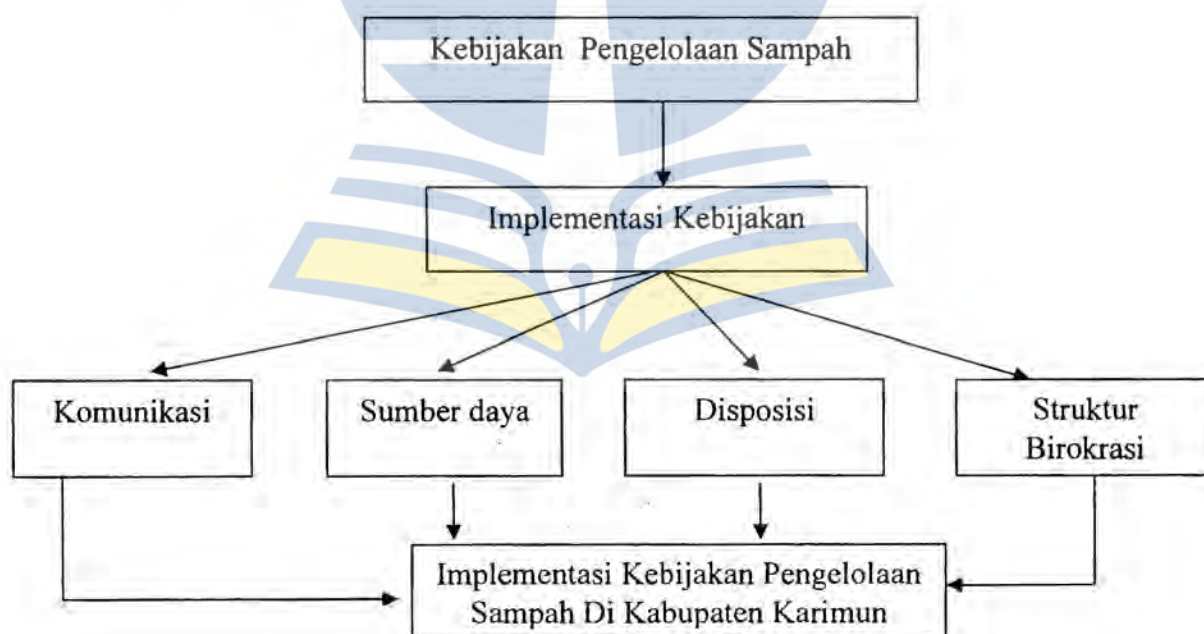
C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dimulai dengan adanya permasalahan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun yang dilakukan dengan cara yang tidak berwawasan lingkungan. Hal ini menyebabkan volume sampah yang masuk ke TPA semakin hari semakin bertambah. Padahal kebijakan tentang pengelolaan sampah telah dibuat, yaitu berupa Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013. Dengan adanya Perda ini, seharusnya pengelolaan sampah harus dilakukan berdasarkan pedoman yang ada dalam Perda tersebut. Namun sampai saat ini implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun masih seperti pola lama, yaitu kumpul, angkut, buang. Dengan demikian terlihat bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun masih belum berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, perlu dilakukan analisis secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, sumber daya disposisi (sikap) dan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edward, dikarenakan teori tersebut menyebutkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Disini peneliti hanya membatasi penelitian terhadap empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat faktor tersebut dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

Edwards menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan (Budi Winarno, 2008:174). Sehingga dari pernyataan diatas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan peneliti dalam mengetahui bagaimana implementasi Perda no 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat faktor tersebut dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

Kerangka pemikirn sebagaimana dijelaskan diatas dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Komunikasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

H₂ : Sumber daya berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

H₃ : Disposisi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

H₄ : Struktur birokrasi berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

H₅ : Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun

D. Operasionalisasi Variabel

1. Defenisi Konsep

Untuk menjelaskan masing-masing variabel dalam hipotesis, maka dalam penelitian ini akan dikemukakan defenisi konsep dalam masing-masing variabel tersebut, yaitu:

a. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah

Yaitu suatu cara atau proses untuk pencapaian tujuan ditetapkannya suatu kebijakan, dan kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.

b. Komunikasi

Yaitu suatu proses penyampaian pesan informasi, ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar dapat paham dan mengerti maksud dan tujuan dari informasi tersebut. Dalam hal ini adalah hubungan dua orang atau lebih yang dilakukan oleh organisasi pelaksana kebijakan dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan, dengan mendapatkan umpan balik.

c. Sumber Daya

Adalah segenap sumber yang dimiliki oleh pemrakarsa kebijakan baik sumber daya manusia maupun sumber-sumber yang lain yang dapat digunakan sebagai daya dukung dalam pelaksanaan program atau kebijakan.

d. Disposisi

Adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

e. Struktur birokrasi

Adalah struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.

2. Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel diartikan sebagai perincian suatu variabel kedalam sub-variabel atau dimensi. Sub-variabel atau dimensi pada umumnya dipecah lagi kedalam yang apa yang dinamakan indikator. Menurut Silalahi (2009:201) dalam Hamdi dan Ismaryati (2014: 4.5), operasionalisasi variabel

sebagian dari proses pengukuran merupakan satu proses yang menghubungkan satu definisi konseptual ke definisi operasional. Operasionalisasi merupakan proses mengubah abstract term atau konsep menjadi empirical term atau indikator.

Tabel 2.2
Operasionalisasi Variabel

| No | Variabel | Dimensi | Indikator |
|----|--|------------------------------|---|
| 1 | Komunikasi (X1) (suatu proses penyampaian pesan informasi, ide dan gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar dapat paham dan mengerti maksud dan tujuan dari informasi tersebut) (Edward III) | 1. Penyampaian informasi | 1. Tingkat penyampaian informasi aparatur kepada masyarakat 2. Banyaknya media yang digunakan untuk sosialisasi kebijakan pengelolaan sampah |
| | | 2. Kejelasan informasi | 3. Tingkat kejelasan pesan /content yang disampaikan 4. Tingkat pemahaman masyarakat atas informasi kebijakan pengelolaan sampah |
| | | 3. Konsistensi | 5. Tingkat konsistensi informasi yang disampaikan 6. Tingkat umpan balik yang disampaikan masyarakat kepada implementator kebijakan 7. Tingkat kerjasama dan koordinasi lembaga implementator |
| 2 | Sumber daya (X2) (Segenap sumber yang dimiliki oleh pemrakarsa kebijakan baik sumber daya manusia maupun | 1. Sumber Daya Manusia (SDM) | 8. Tingkat pendidikan formal yang dimiliki aparatur 9. Tingkat pengetahuan terhadap pentingnya kebijakan pengelolaan |

| | | | |
|---|--|---|--|
| | <p>sumber-sumber yang lain yang dapat digunakan sebagai daya dukung dalam pelaksanaan program atau kebijakan)</p> <p>(Edward III)</p> | | <p>sampah</p> <p>10. Tingkat pemahaman tugas dan tanggung jawab pelaksanaan kebijakan</p> |
| | | 2. Keuangan | <p>11. Besarnya biaya operasional</p> <p>12. Kecukupan Dana</p> |
| | | 3. Sarana | <p>13. Jumlah sarana dan prasarana penunjang</p> <p>14. Tingkat ketersediaan fasilitas umum kebersihan</p> |
| 3 | <p>Disposisi (X3)</p> <p>(keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan)</p> <p>(Edward III)</p> | <p>1. Disiplin Aparatur</p> | <p>15. Tingkat Kepatuhan aparat</p> <p>16. Kejujuran aparat</p> <p>17. Tanggung jawab aparat</p> |
| | | 2. Insentif | <p>18. Pemberian insentif kepada aparat pengelolaan sampah</p> <p>19. Bentuk insentif yang diberikan</p> |
| 4 | <p>Struktur Birokrasi (X4)</p> <p>(struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal)</p> <p>(Edward III)</p> | <p>1. Standart Operating Procedures (SOP)</p> | <p>20. Adanya SOP</p> <p>21. Pelaksanaan SOP</p> |
| | | 2. Fragmentasi (Pembagian Tugas dan Koordinasi) | <p>22. Pembagian tugas tanggung jawab yang jelas</p> <p>23. Luasnya tugas</p> <p>24. Kerjasama organisasi pelaksana kebijakan dengan pihak lain</p> <p>25. Hubungan antar organisasi</p> |
| 5 | <p>Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah (Y)</p> | Langkah-langkah | <p>26. Dukungan Program</p> <p>27. Ketepatan program</p> |

| | | |
|---|----------------------------------|---|
| <p>(Cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya) (Rian Nugroho)</p> | <p>yang dilakukan pemerintah</p> | <p>28. Jenis Kegiatan 29. Manfaat kegiatan 30. Sasaran kegiatan</p> |
|---|----------------------------------|---|



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kombinasi (mixed methods). Penelitian ini merupakan penggabungan dua metode penelitian yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Pada tahap awal dilakukan dengan melaksanakan metode kuantitatif dan dilanjutkan dengan metode kualitatif sebagai pembanding hasil penelitian dengan metode kualitatif.

Creswell (2009) dalam Sugiono (2013 : 478) mengklasifikasikan metode kombinasi menjadi dua model yaitu model sequential (kombinasi berurutan) dan model concurrent (kombinasi campuran). Model urutan (sequential) dibagi dua, yaitu model urutan pembuktian (sequential explanatory) dan model urutan penemuan (sequential eksploratory). Model concurrent (campuran) ada dua yaitu model concurrent triangulation (campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang) dan concurrent ambedded (campuran penguatan / metode kedua memperkuat metode pertama).

Metode penelitian kombinasi model sequential explanatory dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis data kuantitatif pada tahap pertama, dan diikuti dengan pengumpulan data kualitatif pada tahap kedua, guna memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang dilakukan pada tahap pertama (Creswell (2009) dalam Sugiyono (2013:480).

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian model sequential explanatory , yaitu pada tahap pertama mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif, dan pada tahap kedua megumpulkan dan menganisis data kualitatif

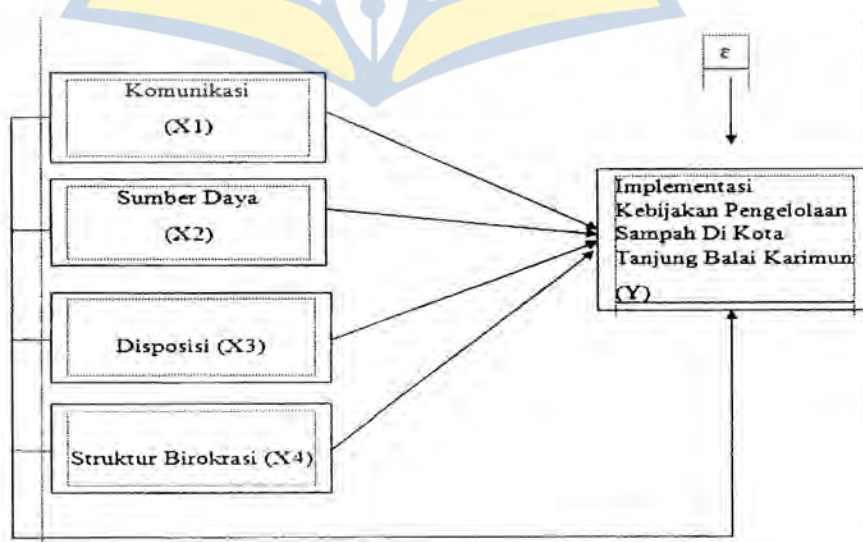
untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif yang telah dilakukan pada tahap pertama.

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah bagian dari metode penelitian yang berisikan uraian mengenai pendekatan penelitian yang dipilih. Dalam penelitian kuantitatif, desain penelitian berisikan uraian mengenai alasan pilihan pendekatan kuantitatif dan tujuan yang akan dicapai dengan penggunaan pendekatan tersebut sesuai dengan hal yang akan diteliti. Desain penelitian disusun setelah pertanyaan penelitian dirumuskan (Hamdi dan Ismaryati, 2014 : 3.25). Silalahi (2009:179) dalam Hamdi dan Ismaryati (2014: 3.25) menyatakan :

“Dalam desain penelitian, diidentifikasi hubungan-hubungan antarvariabel yang akan dijelaskan dalam penelitian, apakah melakukan rancangan hubungan korelasional (mengukur dua atau lebih variable dalam melihat hubungan antar mereka) atau hubungan kausal atau eksperimental (memanipulasi satu variable dan melihat perubahan yang bersamaan dalam kelompok kedua).”

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, maka desain penelitian sebagai model konstelasi penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Desain Penelitian

Desain penelitian yang menjadi model konstelasi penelitian untuk pengukuran pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat mencakup penjelasan sebagai berikut :

1. X1 adalah variable bebas komunikasi, yaitu proses penyampaian suatu pernyataan dari seseorang kepada orang lain.
2. X2 adalah variable bebas sumber daya, yaitu sumber daya manusia (SDM)
3. X3 adalah variable bebas disposisi, yaitu keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.
4. X4 adalah variable bebas struktur birokrasi, yaitu struktur organisasi yang menentukan bagaimana pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal.
5. Y adalah variable terikat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota tanjung Balai Karimun.

Edaward III menjelaskan bahwa terdapat empat variable yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Jumlah populasinya adalah 41 orang. Karena popolasinya kurang dari 100, maka semua populasi dijadikan sampel (sampel jenuh). Untuk mengumpulkan data kualitatif dilakukan penentuan informan yang terdiri dari beberapa orang pegawai Badan Kebersihan Dan

Pertamanan, dan beberapa orang masyarakat. Data kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif.

C. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono (2013 : 179), jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variable yang telah ditetapkan untuk diteliti. Indikator setiap variabel dalam penelitian ini dijabarkan menjadi butir-butir instrumen penelitian. Dalam penelitian ditetapkan lima variable yang akan diteliti, oleh karena itu instrument penelitian yang digunakan berjumlah lima instrument, yaitu:

- 1) Kuesioner untuk mengumpulkan data variabel bebas komunikasi (X1)
- 2) Kuesioner untuk mengumpulkan data variabel bebas sumber daya (X2)
- 3) Kuesioner untuk mengumpulkan data variabel bebas disposisi (X3)
- 4) Kuesioner untuk mengumpulkan data variabel bebas struktur birokrasi (X4)
- 5) Kuesioner untuk mengumpulkan data variabel terikat implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjungbalai Karimun (Y)

Pengukuran variabel dilakukan dengan menggunakan skala *Likert*. Prosedur pengukuran sebagai berikut:

- 1) Responden diminta untuk menyatakan tingkat persetujuan terhadap pernyataan yang diajukan peneliti atas dasar persepsi masing-masing responden. Jawaban terdiri dari lima pilihan, yakni: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Cukup Setuju (CS), Setuju (S), dan Sangat Setuju (SS).
- 2) Pemberian nilai (*scoring*). Untuk jawaban Sangat Setuju (SS) diberikan nilai 5, dan seterusnya menurun sampai pada jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) yang diberikan nilai 1.

Bobot penilaian atas jawaban responden dapat dijelaskan pada Tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Bobot Nilai Jawaban Responden

| Jawaban | Nilai |
|---------------------|-------|
| Sangat Setuju | 5 |
| Setuju | 4 |
| Cukup Setuju | 3 |
| Tidak Setuju | 2 |
| Sangat Tidak Setuju | 1 |

Keuntungan penggunaan format skala Likert ini adalah memungkinkan responden membedakan jawaban mereka diantara yang tak mungkin dijawab dalam bentuk pikiran ganda sehingga dapat lebih jelas menyatakan derajat pendapat mereka atas pelayanan yang mereka terima, lebih dari hanya sekedar terbatas pada jawaban Ya dan Tidak. Setelah kegiatan tersebut dilakukan, selanjutnya adalah melakukan uji instrumen untuk melihat validitas dan reliabilitas kuisisioner. Untuk mengumpulkan data kualitatif digunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara. Data kualitatif digunakan untuk memperkuat hasil penelitian kuantitatif.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam bentuk survei, teknik pengumpulan

data yang utama adalah adalah kuisisioner dan telaah dokumen. Kuisisioner atau angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat daftar pertanyaan kepada responden untuk di jawab. Kuisisioner paling cocok digunakan dalam penelitian kuantitatif dan paling cocok apabila responden, baik jumlah maupun wilayah yang luas. Kuisisioner berupa pertanyaan tertutup dan terbuka.

Dalam penelitian ini kuisisioner yang digunakan adalah kuisisioner tertutup, yaitu responden hanya diperkenankan memilih salah satu alternative jawaban yang sesuai dengan penelitian. Kuisisioner penelitian diantar langsung kepada seluruh pegawai Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun. Kuisisioner disertai dengan penjelasan dan permohonan peneliti mengenai tujuan penelitian ini. Untuk wawancara, peneliti langsung mewawancarai informan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan.

E. Metode Analisis Data

Data-data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini secara umum adalah data kuantitatif, sehingga rancangan penelitian ini akan lebih banyak menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif, tanpa mengurangi kemungkinan untuk mengaplikasikan pendekatan-pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan tertutup untuk mendapatkan data tentang variable komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur biroktasi, dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

Data yang diperoleh dari kuisisioner dengan menggunakan skala Likert merupakan data interval yang bernilai 1, 2, 3, 4, dan 5. Menurut Sugiono

(2013:30), data interval adalah data kuantitatif kontinum yang jaraknya sama, tetapi tidak mempunyai nilai nol absolute. Cooper and Schindler (2003) dalam Sugiono (2013:30) mengemukakan bahwa skala pengukuran sikap (sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik) dengan skor 4,3,2,1 merupakan data interval karena jaraknya sama.

Analisis data akan dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Uji validitas (kesahihan)

Uji validitas digunakan untuk mengukur apakah instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas ini menyangkut akurasi instrumen. Untuk mengetahui apakah kuesioner yang disusun itu valid, maka perlu diuji dengan korelasi antar skor tiap-tiap pertanyaan dengan skor total kuesioner tersebut. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor totalnya yang merupakan jumlah tiap skor butir. Butir yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium (skor total) serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa butir mempunyai validitas yang tinggi pula. Biasanya syarat minimum yang dianggap memenuhi syarat adalah $r = 0.3$. Kalau korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0.3 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid (Sugiyono, 2013).

2. Uji Reliabilitas (keandalan)

Uji reabilitas data yang dilakukan dengan menggunakan uji Alpha Cronbach. Keandalan pengukuran dengan menggunakan Alpha Cronbach adalah koefisien keandalan yang menunjukkan seberapa baiknya item/butir dalam suatu

kumpulan secara positif satu sama lain. Tentang uji reliabilitas ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk menilai kestabilan ukuran dan konsistensi responden dalam menjawab kuesioner. Kuesioner tersebut mencerminkan konstruk sebagai dimensi suatu variabel yang disusun dalam bentuk pertanyaan
- b. Uji reliabilitas dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh pertanyaan
- c. Jika nilai $\alpha > 0,60$ dinyatakan reliabel.

3. Uji Asumsi Klasik

Model regresi akan menghasilkan estimator tidak bias jika memenuhi asumsi klasik yaitu bebas multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan betul-betul terbebas dari adanya gejala autokorelasi, multikolinearitas dan gejala heteroskedastisitas, perlu dilakukan pengujian yang disebut dengan uji asumsi klasik.

a. Uji Normalitas Data

Distribusi normal merupakan distribusi teoritis dari variabel random yang kontinyu. Menurut Gujarati (1995), alat diagnostik yang digunakan untuk memeriksa data yang memiliki distribusi normal adalah plot peluang normal (*normal probability plot*). *Normal probability plot* ini dilakukan dengan membandingkan nilai observasi (*observed normal*) dengan nilai yang diharapkan dari distribusi normal (*expected normal*). Jika *plotting* data terletak pada garis diagonal atau mendekati berarti data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya,

bila *plotting* data menjauhi garis diagonal berarti data tersebut tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Tujuan utama pengujian ini adalah untuk menguji apakah variabel independen yang ada benar-benar mempunyai hubungan yang erat dengan variabel dependen. Sehingga variabel independen yang ada benar-benar dapat menjelaskan dengan pasti untuk variabel dependen.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Variance Inflation Factor atau VIF yang merupakan kebalikan dari toleransi sehingga formulanya sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{1-(R^2)} = \frac{1}{\text{tolerance}} \quad (\text{Rumus 1})$$

Di mana:

VIF = *Variance Inflation Factor*

R^2 = Koefisien korelasi

R^2 merupakan koefisien determinasi. Bila toleransi kecil artinya menunjukkan nilai VIF akan besar, untuk itu bila $VIF > 5$ maka dianggap ada multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya, sebaliknya jika nilai $VIF < 5$ maka dianggap tidak terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2005).

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian yang dilakukan melihat ada

tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot. Jika scatterplot menunjukkan adanya pola tertentu maka terdapat heteroskedastisitas. Jika titik-titiknya menyebar atau tidak membentuk suatu pola serta data menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terdapat heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

Menurut Sugiyono (2013), hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis itu harus dibuktikan melalui data yang terkumpul. Adapun dalam penelitian ini uji hipotesis yang dilakukan adalah

a. Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan biasanya berskala interval atau rasio.

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Keterangan:

Y' = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan)

X_1 dan X_2 = Variabel independen

a = Konstanta (nilai Y' apabila $X_1, X_2, \dots, X_n = 0$)

b = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

b. Uji Korelasi Ganda (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara serentak terhadap variabel dependen (Y), nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati, 1995). Persentase tersebut menunjukkan seberapa besar variabel independen (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi) dapat menjelaskan variabel dependennya (Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjungbalai Karimun). Semakin besar koefisien determinasinya, semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya. Dengan demikian regresi yang dihasilkan baik untuk mengestimasi nilai variabel dependen.

Untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen dapat dilihat dari koefisien korelasi parsialnya. Variabel independen yang memiliki koefisien korelasi parsial yang paling besar merupakan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel dependen.

d. Uji Koefisien Regresi Secara Bersama-sama (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F pada output SPSS dapat dilihat pada tabel Anova (Gujarati, 1995). Pedoman yang digunakan untuk menerima atau menolak hipotesis:

- a) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 diterima, yang berarti berarti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi secara bersama sama tidak berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungbalai Karimun.
- b) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima, yang berarti berarti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur birokrasi secara bersama sama berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungbalai Karimun.

e. Uji Koefisien Regresi Secara Partial (Uji t)

Dilakukan dengan menguji apakah pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara individual yaitu dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} . Untuk mengetahui hipotesis yang diajukan itu diterima atau ditolak, maka digunakan ketentuan sebagai berikut:

- a) Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima, yang berarti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi secara partial tidak berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungbalai Karimun.

- b) Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak, yang berarti Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi secara partial berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tanjungbalai Karimun.

5. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas untuk masing-masing pernyataan dilakukan dengan menggunakan *Korelasi Pearson* melalui aplikasi SPSS. Setiap butir pernyataan berkorelasi positif terhadap skor total dengan signifikansi pada level 0,05. Untuk dibandingkan dengan range yang dipakai untuk mengukur validitas yaitu jika korelasi $> 0,3$, maka butir pernyataan tersebut valid, sebaliknya jika korelasi $< 0,3$ maka butir pernyataan tersebut tidak valid untuk digunakan dalam sebuah penelitian. Hasil uji validitas setiap butir pernyataan masing-masing variable dijelaskan sebagai berikut.

1) Instrumen Komunikasi

Hasil uji validitas untuk instrument komunikasi dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.2

Hasil Uji Validitas Data Komunikasi

| Item Pernyataan | Korelasi Pearson | Validitas |
|-----------------|------------------|-----------|
| KM1 | 0,700 | Valid |
| KM2 | 0,848 | Valid |

| | | |
|-----|-------|-------|
| KM3 | 0,588 | Valid |
| KM4 | 0,613 | Valid |
| KM5 | 0,731 | Valid |
| KM6 | 0,584 | Valid |
| KM7 | 0,589 | Valid |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa semua item pernyataan untuk instrument komunikasi (KM1, KM2, KM3, KM4, KM5, KM6 dan KM7) mempunyai nilai korelasi pearson > 0.3 . Oleh karena itu item pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat disertakan dalam pengujian reliabilitas.

2) Instrumen Sumber Daya

Hasil uji validitas untuk instrument sumber daya dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas Data Sumber Daya

| Item Pernyataan | Korelasi Pearson | Validitas |
|-----------------|------------------|-----------|
| SD1 | 0,528 | Valid |
| SD2 | 0,655 | Valid |
| SD3 | 0,629 | Valid |

| | | |
|-----|-------|-------|
| SD4 | 0,574 | Valid |
| SD5 | 0,686 | Valid |
| SD6 | 0,627 | Valid |
| SD7 | 0,778 | Valid |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa item pernyataan untuk SD1, SD2, SD3, SD4, SD5, SD6 dan SD7 mempunyai nilai korelasi pearson > 0.3. Oleh karena itu item pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat disertakan dalam pengujian reliabilitas

3) Instrumen Disposisi

Hasil uji validitas untuk instrument disposisi dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.4

Hasil Uji Validitas Data Disposisi

| Item Pernyataan | Korelasi Pearson | Validitas |
|-----------------|------------------|-----------|
| DP1 | 0,833 | Valid |
| DP2 | 0,750 | Valid |
| DP3 | 0,861 | Valid |
| DP4 | 0,790 | Valid |
| DP5 | 0,792 | Valid |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa item pernyataan untuk DP1, DP2, DP3, DP4 dan DP5 mempunyai nilai korelasi pearson > 0.3 . Oleh karena itu item pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat disertakan dalam pengujian reliabilitas

4) Instrumen Struktur Birokrasi

Hasil uji validitas untuk instrument struktur birokrasi dapat dilihat pada Tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.5
Hasil Uji Validitas Data Struktur Birokrasi

| Item Pernyataan | Korelasi Pearson | Validitas |
|-----------------|------------------|-----------|
| SB1 | 0,626 | Valid |
| SB2 | 0,798 | Valid |
| SB3 | 0,642 | Valid |
| SB4 | 0,405 | Valid |
| SB5 | 0,767 | Valid |
| SB6 | 0,789 | Valid |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa item pernyataan untuk SB1, SB2, SB3, SB4, SB5 dan SB6 mempunyai nilai korelasi pearson > 0.3 . Oleh karena itu item pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat disertakan dalam pengujian reliabilitas

5) Instrumen Implementasi Kebijakan

Hasil uji validitas untuk instrument implementasi kebijakan dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.6

Hasil Uji Validitas Data Implementasi Kebijakan

| Item Pernyataan | Korelasi Pearson | Validitas |
|-----------------|------------------|-----------|
| IK1 | 0,700 | Valid |
| IK2 | 0,846 | Valid |
| IK3 | 0,825 | Valid |
| IK4 | 0,797 | Valid |
| IK5 | 0,696 | Valid |

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa item pernyataan untuk IK1, IK2, IK3, IK4 dan IK5 mempunyai nilai korelasi pearson > 0.3 . Oleh karena itu item pernyataan tersebut dikatakan valid dan dapat disertakan dalam pengujian reliabilitas

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas didasarkan pada nilai *cronbach alpha*. Jika nilai alpha > 0.60 , maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliable. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.7
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Jumlah Item | Cronbach Alpha | Reliabilitas |
|--------------------------------|-------------|-------------------|--------------|
| Komunikasi (KM) | 8 | 0,763 | Reliabel |
| Sumber Daya (SD) | 8 | 0,756 | Reliabel |
| Disposisi (DP) | 6 | 0,807 | Reliabel |
| Struktur Birokrasi (SB) | 7 | 0,762 | Reliabel |
| Implementasi Kebijakan (IK) | 6 | 0,800 | Reliabel |

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa nilai reliabilitas untuk variabel Komunikasi 0,784, Sumber daya 0,763, Disposisi 0,816, Struktur Birokrasi 0,782 dan Implementasi kebijakan 0.813. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sudah reliabel.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

a. Badan Kebersihan dan Pertamanan (BKP) merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dibawah struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Badan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai visi “Terwujudnya kabupaten karimun Yang Bersih, Indah Dan Nyaman.” Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, Badan Kebersihan Dan Pertamanan mempunyai misi sebagai berikut:

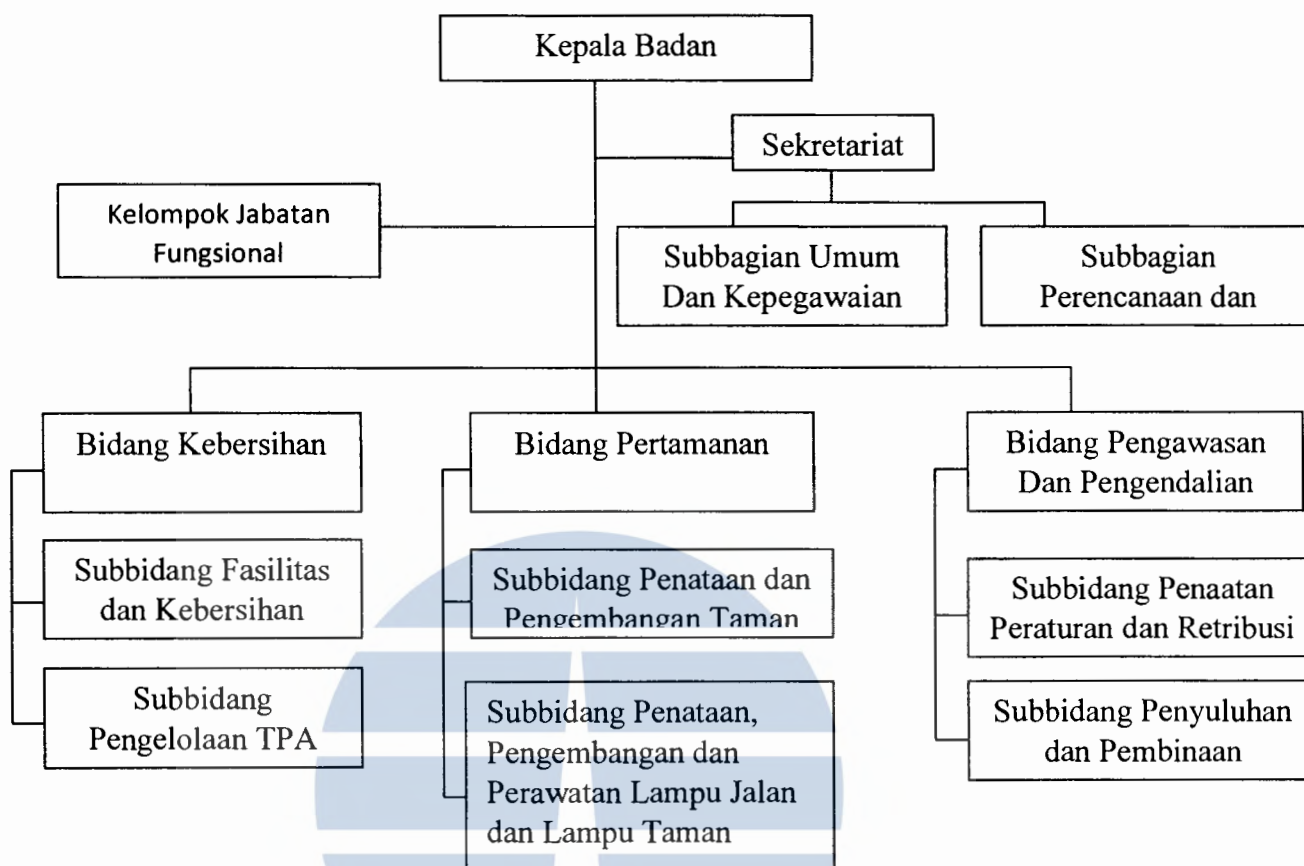
- 1) Meningkatkan kualitas manajemen sumber daya manusia, sarana dan prasarana Kebersihan dan Pertamanan;
- 2) Meningkatkan pelayanan kebersihan yang prima;
- 3) Meningkatkan keindahan kota;
- 4) Menciptakan regulasi teknis dalam pengendalian dan pengawasan Kebersihan dan Pertamanan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, Bidang kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan teknis operasional tentang penataan kebersihan yang menjadi kewajiban dan kewenangan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Badan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan penataan kebersihan;
- b. Melakukan penataan kebersihan kota;
- c. Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebersihan;
- d. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait dalam upaya memperlancar pelaksanaan penataan kebersihan;
- e. Mempersiapkan rencana umum kebijakan teknis operasional pelaksanaan penataan taman;
- f. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan penataan taman kota;
- g. Melaksanakan penataan taman;
- h. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain dalam upaya pelaksanaan penataan taman;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 16 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Unit Kerja Pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Karimun, Badan Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah di bidang kebersihan dan pertamanan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Badan Kebersihan dan Pertamanan dipimpin oleh seorang kepala badan dan dibantu oleh seorang sekretaris, tiga orang kepala bidang, dua orang kepala subbagian dan enam orang kepala subbidang. Struktur Organisasi Badan Kebersihan dan Pertamanan tergambar dalam bagan berikut:



Gambar 4.1.
Struktur Organisasi Badan Kebersihan dan Pertamanan
Kabupaten Karimun

Bidang yang secara langsung terkait dengan pengelolaan sampah Di Badan Kebersihan dan Pertamanan adalah Bidang Kebersihan . Bidang Kebersihan mempunyai tugas pokok melakukan perumusan kebijakan dan teknis operasional tentang penataan dan kebersihan yang menjadi kewajiban dan kewenangan Daerah.

Adapun uraian tugas Bidang Kebersihan adalah sebagai berikut:

- a. lakukan perumusan kebijakan teknis operasional dalam pelaksanaan penataan kebersihan;
- b. Melakukan penataan kebersihan kota;

- c. Melakukan perumusan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebersihan;
- d. Melakukan koordinasi, pelaksanaan pengumpulan, dan pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- e. Melakukan koordinasi, pelaksanaan penyediaan peralatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kebersihan;
- f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
- g. Melakukan koordinasi, pelaksanaan penyediaan peralatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Work Shop;
- h. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja instansi terkait dalam upaya melancarkan pelaksanaan penataan kebersihan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bidang kebersihan terdiri dari:

- a. Sub Bidang Fasilitas dan Operasional Kebersihan

Sub Bidang Fasilitas dan Operasional Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan teknis operasional pelaksanaan dan penataan fasilitas dan operasional kebersihan.

Adapun uraian tugas Bidang Fasilitas dan Operasional Kebersihan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengumpulan data dalam rangka penentuan jumlah petugas, sarana dan prasarana kebersihan;

- 2) Melakukan pembenahan sarana dan prasarana dalam rangka fasilitas dan operasional kebersihan;
- 3) Melakukan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan fasilitas dan operasional kebersihan;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja dan instansi lain untuk mempermudah pelaksanaan fasilitas dan operasional kebersihan;
- 5) Melaksanakan tugas lain sejenis pelayanan publik yang ditugaskan kepala Bidang Kebersihan.

b. Sub Bidang Pengelolaan TPA dan Work Shop

Sub Bidang Pengelolaan TPA dan Work Shop mempunyai tugas Pokok melakukan penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengelolaan TPA dan Work Shop sebagai sarana penunjang program kebersihan.

Adapun uraian tugas Sub Bidang Pengelolaan TPA dan Work Shop adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun rencana teknis kegiatan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehubungan dengan pengumpulan, pemindahan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan sampah di TPA termasuk pengendalian pencemaran lingkungan akibat dari sampah;
- 2) Melakukan rencana teknis dalam pengelolaan Work Shop;
- 3) Melakukan penataan dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

- 4) Melakukan penyiapan kajian teknis tentang pengelolaan sampah di TPA;
- 5) Penyiapan regulasi dan pengaturan yang diperlukan dalam menunjang pengelolaan sampah di TPA;
- 6) Melakukan pembenahan sarana dan prasarana Work Shop dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap armada kebersihan;
- 7) Melakukan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan TPA dan Work Shop;
- 8) elaksanakan tugas lain yang ditugaskan Kepala Bidang Kebersihan.

Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun yng berjumlah 41 orang.

B. Hasil

1. Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan pada tiap item, yaitu dengan mengkorelasikan skor tiap butir pernyataan dengan skor total yang merupakan jumlah dari tiap skor butir (Sugiyono, 2013). Uji validitas dilakukan terhadap masing-masing instrument (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) sebanyak 41 kuisisioner yang telah ditabulasi terlebih dahulu (data tabulasi terlampir). Dari hasil pengujian data, didapatkan hasil bahwa item pernyataan semua instrumen yang digunakan valid, yaitu dengan nilai korelasi pearson $> 0,3$. Hasil pengujian validitas pada penelitian ini telah dilaporkan pada Bab III sebelumnya.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas didasarkan pada nilai *cronbach alpha*. Jika nilai $\alpha > 0.60$, maka data yang digunakan dalam penelitian ini reliable, sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya. Dari hasil pengujian reliabilitas didapatkan hasil bahwa semua item pernyataan pada semua instrumen yang digunakan telah reliable, yaitu dengan nilai *cronbach alpha* $> 0,60$. Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini telah dilaporkan pada Bab III sebelumnya.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data. bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dilakukan karena pada analisis statistik parametik, asumsi yang harus dimiliki oleh data adalah bahwa data tersebut harus terdistribusi secara normal. Maksud data terdistribusi secara normal adalah bahwa data akan mengikuti bentuk distribusi normal.

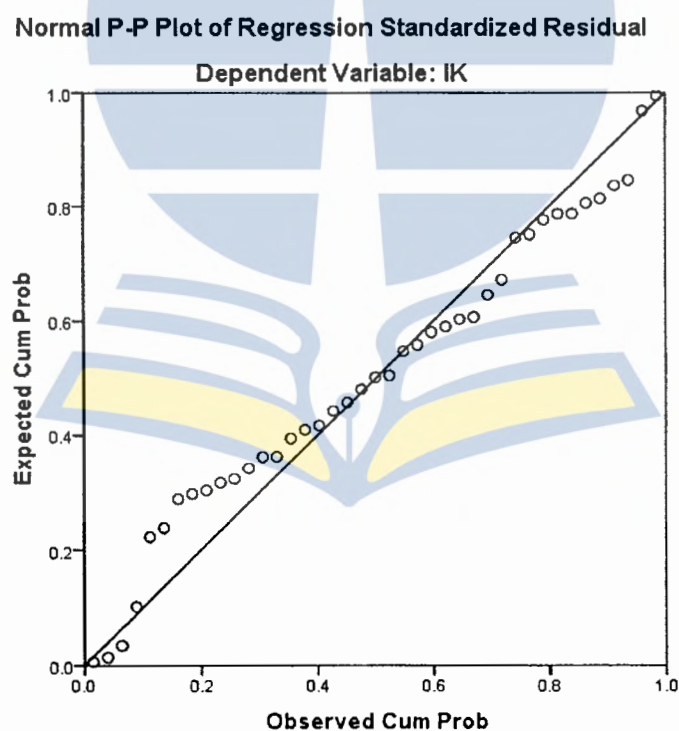
Uji normalitas bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan *Normal P-P Plot* dan *Tabel Kolmogorov Smirnov*. Namun cara yang paling umum dilakukan adalah *Normal P-P Plot*.

Dalam penelitian ini uji normalitas dilakukan dengan cara P-P Plot. Pada Normal P-P Plot prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Kriteria yang digunakan adalah menurut Ghazali (2005), yaitu:

1. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas;
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tersebut tidak memenuhi normalitas.

Berdasarkan output regresi linear berganda dapat ditampilkan sebagai berikut:

Hasil uji normalitas data dengan menggunakan P-P Plot Standardized Residual dapat dilihat pada gambar dibawah:



Gambar 4.2 Normal Probability Plot

Pada Gambar 4.2 terlihat bahwa data menyebar mendekati garis diagonal dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolenieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (Ghozali, 2005). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, dapat dilihat dari *Value Inflation Factor* (VIF).

Menurut Santoso (2001) dalam Sentosa (2008), regresi yang bebas multikolenieritas ditandai dengan nilai VIF berkisar angka 5. Artinya bila toleransi kecil menunjukkan nilai VIF yang besar. Dengan demikian, bila $VIF > 5$ dianggap terjadi multikolenieritas dengan variabel lainnya, sebaliknya jika diperoleh $VIF < 5$ maka dianggap tidak terjadi multikolenieritas antara satu variabel independen dengan variabel independen lainnya dalam persamaan regresi.

Hasil pengujian multikolenieritas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Nilai VIF Uji Multikolinieritas

| Variabel | Toleransi | VIF | Keterangan |
|--------------------|-----------|-------|-------------------------|
| Komunikasi | 0,318 | 2,199 | Bebas multikolenieritas |
| Sumber daya | 0,513 | 2,669 | Bebas multikolenieritas |
| Disposisi | 0,332 | 1,931 | Bebas multikolenieritas |
| Struktur birokrasi | 0,646 | 1,930 | Bebas multikolenieritas |

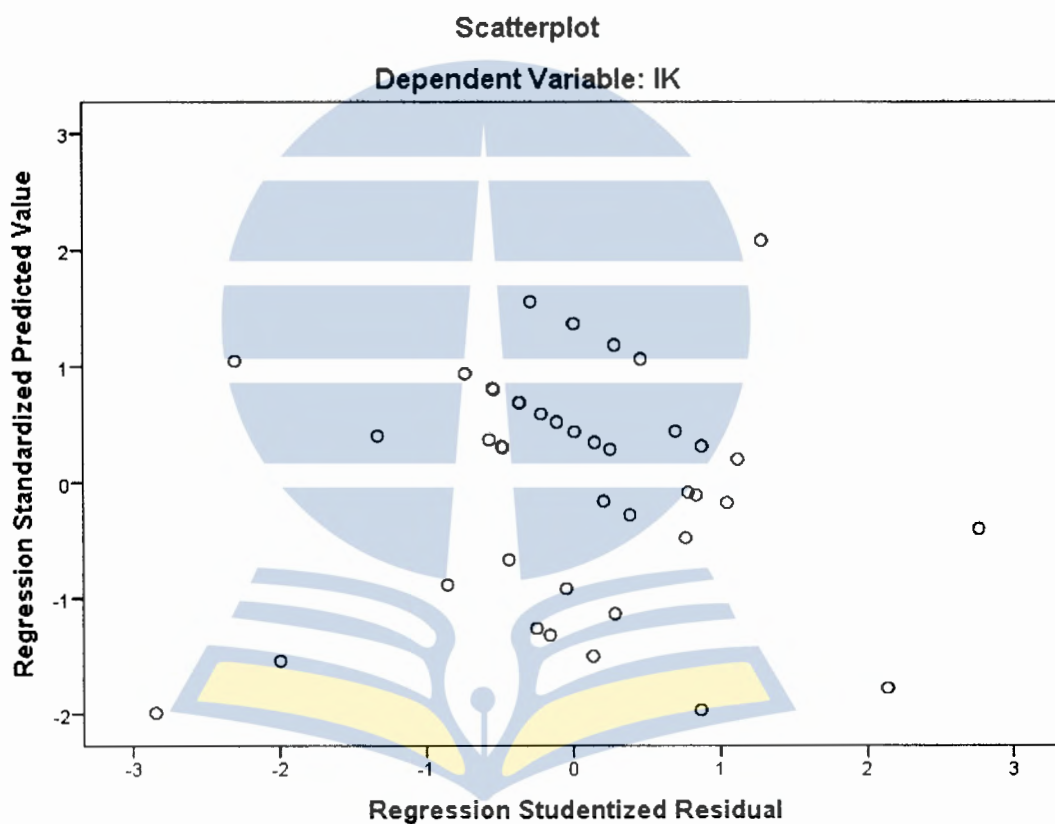
Pada Tabel 4.1 terlihat bahwa nilai VIF dari ke empat variabel independen (Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur birokrasi) berada dibawah atau < 5 , sehingga sapat disimpulkan bahwa tidak model regresi yang digunakan bebas dari pengaruh multikolenieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam model regresi bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari nilai residual penelitian. Untuk mendeteksi gejala heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen). Dasar analisis yang dipakai adalah sebagai berikut:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.3 Grafik Scatterplot

Pada Gambar 4.3 terlihat bahwa terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Artinya pada model regresi yang digunakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Linier Berganda

Uji regresi linier berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana, positif atau negatif dan sebesar apa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini pengujian dilakukan untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel independen yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi mempengaruhi variabel dependen yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS (*Statistical Product Service Solution*) versi 23. Dalam penelitian ini digunakan suatu model analisis regresi berganda, yaitu menggunakan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dalam menjelaskan variabel implementasi kebijakan pengelolaan sampah, sehingga didapat persamaan:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Hasil analisis regresi berganda dengan metode enter untuk model analisis dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Regresi dengan Metode Enter

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients |
|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------|
| | B | Std. Error | Beta |
| 1 (Constant) | 0,996 | 2,121 | |
| KM | 0,269 | 0,101 | 0,363 |
| SD | 0,236 | 0,113 | 0,314 |
| DP | 0,167 | 0,118 | 0,181 |
| SB | 0,108 | 0,110 | 0,110 |

a. Dependent Variable: IK

Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y' = a + b_1KM + b_2SD + b_3DP + b_4SB$$

$$Y' = 0,996 + 0,269KM + 0,236SD + 0,167DP + 0,108SB$$

Keterangan:

Y' = Implementasi kebijakan

a = Konstanta (nilai Y' apabila KM , SD , DP dan $SB = 0$)

b_1 , b_2 , b_3 dan b_4 = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan)

KM = Komunikasi

SD = Sumber daya

DP = Disposisi

SB = Struktur birokrasi

Dari Tabel 4.2 diatas terlihat bahwa nilai koefisien korelasi untuk semua variabel dependen (KM , SD , DP dan SB) bernilai positif. Ini berarti bahwa apabila terjadi peningkatan terhadap nilai koefisien korelasi variabel dependen, maka akan nilai variabel dependen (IK) akan meningkat.

b. Uji Korelasi Ganda (R)

Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) terhadap variabel dependen (Y) secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara serentak terhadap variabel dependen (Y). nilai R berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah.

Menurut Sugiyono (2013) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00 - 0,199 = sangat rendah

0,20 - 0,399 = rendah

0,40 - 0,599 = sedang

0,60 - 0,799 = kuat

0,80 - 1,000 = sangat kuat

Dari hasil analisis regresi, lihat pada output *model summary* dan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil analisis korelasi ganda
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | .835 ^a | .697 | .664 |

a. Predictors: (Constant), SB, KM, DP, SD

b. Dependent Variable: IK

Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,835. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah..

c. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Uji koefisien determinan dalam regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (X_1 , X_2 , X_3 , dan X_4) secara setentak terhadap variabel dependen (Y). Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi variabel independen yang digunakan dalam

model mampu menjelaskan variabel dependen. Jika R^2 sama dengan 0, maka tidak ada sedikitpun prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika R^2 sama dengan 1, maka prosentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna. Dengan demikian Adjusted R^2 bernilai antara 0 dan 1.

Hasil analisis regresi dapat dilihat pada output *model summary* sebagai berikut:

Tabel 4.4
Koefisien Determinan
Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square |
|-------|-------------------|----------|-------------------|
| 1 | .835 ^a | .697 | .664 |

a. Predictors: (Constant), SB, KM, DP, SD

b. Dependent Variable: IK

Pada Tabel 4.3 diatas diperoleh nilai R^2 (*R Square*) sebesar 0,697 atau 69,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase sumbangan pengaruh variabel independen (KM,SD, DP dan SB) terhadap variabel dependen (implementasi kebijakan) sebesar 69,7 %. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (KM,SD, DP dan SB) mampu menjelaskan sebesar 69,7 % variasi variabel dependen (implementasi kebijakan). Sedangkan sisanya sebesar 30,3% % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

d. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (KM, SD, DP dan SB) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (IK). Atau untuk mengetahui apakah model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau tidak. Jika hasil signifikan berarti ada hubungan yang terjadi dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasikan). Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternative, yang menyatakan bahwa variabel independen (komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi) berpengaruh terhadap variabel dependen (implementasi kebijakan) dapat diterima. Hasil output analisis regresi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji F
ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 185.393 | 4 | 46.348 | 20.725 | .000 ^b |
| | Residual | 80.509 | 36 | 2.236 | | |
| | Total | 265.902 | 40 | | | |

a. Dependent Variable: IK

b. Predictors: (Constant), SB, KM, DP, SD

Dari Tabel 4.4 diatas didapatkan nilai F hitung sebesar 20,725.

Setelah didapatkan F hitung, maka harus ditentukan F tabelnya, yaitu dengan cara:

- 1) Menentukan signifikansi, yaitu tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$ (signifikansi 5% atau 0,05 adalah ukuran standar yang sering digunakan dalam penelitian)

2) Dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%, $\alpha = 5\%$, df 1 (jumlah variabel-1) = 4, dan df 2 (n-k-1) atau 41-4-1 = 36 (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 2,626

Jika dibandingkan F tabel dan F hitung, maka F hitung > F tabel (20,725 > 2,626). Karena F hitung > F tabel, maka H_0 ditolak , artinya ada pengaruh secara signifikan KM, SD, DP dan SB secara bersama-sama terhadap implementasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa KM, SD, DP dan SB secara bersama-sama berpengaruh terhadap implementasi kebijakan

e. Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (KM, SD, DP dan SB) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (IK).

Dari hasil analisis regresi output dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel. 4.6

Hasil Uji t

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | .996 | 2.121 | | .470 | .641 |
| | KM | .269 | .101 | .363 | 2.671 | .011 |
| | SD | .236 | .113 | .314 | 2.094 | .043 |
| | DP | .167 | .118 | .181 | 1.417 | .165 |
| | SB | .108 | .125 | .110 | .865 | .393 |

a. Dependent Variable: IK

Dari Tabel 4.5 diatas didapatkan nilai t hitung untuk masing-masing variabel, yaitu: komunikasi (KM) 2,671, dengan nilai sig 0,011; sumber daya (SD) 2,094, dengan nilai sig 0,043; disposisi (DP) 1,417, dengan nilai sig 0,165 dan struktur birokrasi 0,865, dengan nilai sig 0,393.

Tingkat signifikansi menggunakan $\alpha = 5\%$

Tabel distribusi t dicari pada $= 5\% : 2 = 2,5\%$ (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df) $n-k-1$ atau $41-4-1 = 36$ (n adalah jumlah kasus dan k adalah jumlah variabel independen). Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk t tabel sebesar 2,028.

Pengujian koefisien regresi variabel Komunikasi (KM)

Nilai t hitung pada variabel komunikasi adalah 2,671. Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel komunikasi didapatkan t hitung $>$ t tabel yaitu $2,671 > 2,028$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel komunikasi secara partial berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Pengujian koefisien regresi variabel sumber daya

Nilai t hitung pada variabel sumber daya adalah 2,094. Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel sumber daya didapatkan t hitung $>$ t tabel yaitu $2,094 > 2,028$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sumber daya secara partial berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Pengujian koefisien regresi variabel disposisi

Nilai t hitung pada variabel disposisi adalah 1,417. Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel disposisi didapatkan t hitung $<$ t tabel yaitu 1,417

$< 2,028$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Pengujian koefisien regresi variabel struktur birokrasi

Nilai t hitung pada variabel struktur birokrasi adalah $0,865$. Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, pada variabel disposisi didapatkan t hitung $< t$ tabel yaitu $0,865 < 2,028$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel disposisi secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

C. Pembahasan

Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Balai Karimun

Dari hasil analisis data kuantitatif, didapatkan bahwa komunikasi mempunyai hubungan secara positif dengan nilai koefisien regresi $0,269$. Koefisien regresi variabel independen komunikasi sebesar $0,269$; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan komunikasi meningkat 1% , maka nilai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun akan meningkat sebesar $26,9\%$. Dari hasil uji parsial yang telah dijelaskan sebelumnya didapatkan t hitung variabel komunikasi $2,671$. Sedangkan t tabel yang diperoleh adalah $2,028$. Jika dibandingkan t hitung dengan t tabel, maka untuk variabel komunikasi didapatkan t hitung $> t$ tabel ($2,671 > 2,028$). Dengan demikian, komunikasi secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap

implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa apabila komunikasi dilakukan dengan maksimal baik dalam organisasi maupun diluar organisasi maka akan meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan hasil penelitian juga terlihat bahwa kebijakan pengelolaan sampah ini sangat berguna bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan sampah kota. Proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di kota Tanjung Balai Karimun berjalan lancar dengan melakukan proses komunikasi. Dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan implementasi yang efektif dilakukan komunikasi. Dengan melakukan komunikasi maka pesan dan tujuan yang ingin dicapai akan sampai kepada masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber dari Bidang Kebersihan Badan Kebersihan dan Pertamanan diketahui bahwa dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, telah dilakukan komunikasi dengan cara: sosialisasi Peraturan Daerah tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, yaitu melalui aparat kecamatan dan kelurahan/desa; melalui media elektronik (Radio Canggai Putri dan Radio Azam).

Dari hasil wawancara juga disampaikan bahwa sebagian masyarakat telah memahami informasi yang telah disampaikan. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat juga telah mendapat umpan balik, yang dibuktikan dengan bertambahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, yaitu dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan bertambahnya masyarakat yang ikut melaksanakan pengelolaan sampah dengan memilah sampah

dan memanfaatkan sampah, baik dengan menabung di bank sampah maupun mendaur ulang kembali sampah. Namun demikian perlu peningkatan komunikasi dengan menyebarkan informasi yang lebih baik dan langsung kepada masyarakat agar tujuan kebijakan pengelolaan sampah dapat tercapai.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat selaku sasaran kebijakan pengelolaan sampah tentang komunikasi yang telah dilakukan oleh Badan Kebersihan Dan Pertamanan, mereka berpendapat bahwa kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sampah sangat bagus apabila dilaksanakan dengan baik. Namun menurut mereka belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang isi kebijakan tersebut secara detail. Hal ini disebabkan karena sosialisasi kepada masyarakat secara langsung masih belum dilaksanakan secara optimal. Sosialisasi secara langsung baru dilaksanakan kepada aparat kecamatan dan kelurahan/desa. Sosialisasi secara langsung baru dilaksanakan sebatas pemberitahuan dan pengumuman melalui media elektronik (radio) dan melalui spanduk – spanduk yang dipasang di tempat-tempat umum. Hal ini menyebabkan masyarakat belum banyak mengetahui secara detail bagaimana cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

Dari hasil wawancara ini diketahui bahwa masyarakat hanya mengetahui cara pengelolaan sampah secara garis besar, sehingga menyebabkan umpan balik yang diberikan masih sebatas membersihkan lingkungan dari sampah, sedangkan penanganan sampah secara optimal seperti pemilahan sampah hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat.. Hal inilah yang menyebabkan belum optimalnya implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun, sehingga jumlah volume sampah yang masuk ke TPA selalu bertambah.

Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Balai Karimun

Dari hasil analisis data kuantitatif, didapatkan bahwa sumber daya mempunyai hubungan secara positif dengan nilai koefisien regresi 0,236. Koefisien korelasi variabel independen sumber daya sebesar 0,236; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan sumber daya meningkat 1 %, maka nilai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun akan meningkat sebesar 23,6%. Dari uji partial yang telah dilakukan didapatkan t hitung 2,094 dan t tabel 2,094, sehingga untuk variabel sumber daya, t hitung > t tabel ($2,094 > 2,028$). Dengan demikian variabel sumber daya berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian juga terlihat bahwa sumber daya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya (sarana dan prasarana). Hasil wawancara dengan nara sumber dari Bidang Kebersihan Badan Kebersihan dan Pertamanan diketahui bahwa sumber daya manusia pelaksana kebijakan pengelolaan sampah sudah cukup baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Sumber daya manusia yang dimiliki Badan Kebersihan dan Pertamanan dapat terlihat pada tabel berikut:

TABEL 4.1
JUMLAH PEGAWAI BADAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN KARIMUN

| No | Status Kepegawaian | Jumlah | No | Status Kepegawaian | Jumlah |
|-----------|---------------------------|---------------|-----------|---------------------------|---------------|
| 1 | PNS | 33 | 4 | Tenaga Harian Lepas | |
| | Golongan IV/c | 1 | | Supir Truk Sampah | 17 |
| | Golongan IV/a | 3 | | Supir Kendaraan Roda 3 | 15 |
| | Golongan IV/b | 1 | | Operator Alat Berat | 3 |
| | Golongan III/d | 4 | | Pengawas | 20 |
| | Golongan III/c | 4 | | Pemungut sampah /Abk | 61 |
| | Golongan III/b | 2 | | Penggali Selokan | 15 |
| | Golongan II/d | 2 | | Pemilah Sampah | 15 |
| | Golongan II/c | 6 | | Pekerja /Tk.Sapu | 139 |
| | Golongan II/b | 7 | | Teknisi Workshop | 3 |
| | Golongan II/a | 2 | | Pembantu Teknisi | 3 |
| | Golongan I/d | 1 | | Koordinator | 2 |
| 2 | Pegawai Kontrak | 9 | | Petugas Lapangan Tpa | 4 |
| 3 | Tenaga Honor Lokal | 19 | | | |
| | Jumlah | 70 | | | - |

Sumber: Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawai (PNS, pegawai honor kontrak dan tenaga honor local) berjumlah 70 orang. Pegawai ini bertugas sebagai pelaksana kebijakan yang berkaitan dengan kebersihan (pengelolaan sampah dan pertamanan). Sedangkan petugas lapangan (tenaga harian lepas) berjumlah 375 orang dan bertugas sebagai pelaksana kebijakan dilapangan. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa SDM yang bertugas sebagai pelaksana

kebijakan pengelolaan sampah telah memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber dari Bidang Kebersihan Badan Kebersihan dan Pertamanan, sumber daya berupa dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah masih kurang. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk mencapai pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu pelayanan sampah masih kurang maksimal karena pengangkutan sampah yang dilakukan hanya satu kali dalam sehari. Kondisi ini yang menyebabkan adanya penumpukan sampah dan keterlambatan dalam pengangkutan.

Disamping sumber daya manusia dan dana, diperlukan juga sarana dan prasarana untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber dari Badan Kebersihan dan Pertamanan, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang disediakan pemerintah sudah cukup, namun perlu penambahan dan pembaharuan sarana yang sudah tua dan rusak. Sarana yang perlu ditambah adalah tong sampah, container, truk sampah (dump truck), arm roll dan sarana lainnya yang menunjang pengelolaan sampah, baik di sumber sampah maupun di TPA.

Dari hasil wawancara dengan masyarakat, dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah berupa tong sampah di tempat-tempat umum, komposter atau tempat pengomposan di areal pemukiman, TPS, dan kendaraan pengangkut sampah. Mereka mengatakan bahwa sarana yang disediakan masih kurang sehingga penanganan sampah masih kurang optimal.

Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Balai Karimun

Dari hasil analisis data kuantitatif, didapatkan bahwa disposisi mempunyai hubungan secara positif dengan nilai koefisien regresi 0,167. Koefisien korelasi variabel independen disposisi sebesar 0,167; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan disposisi meningkat 1 %, maka nilai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun akan meningkat sebesar 16,7%. Dari hasil uji parsial didapatkan t hitung variabel disposisi 1,417, dan t tabel 2,028. Nilai t positif menunjukkan bahwa disposisi mempunyai hubungan yang searah dengan implementasi kebijakan. Untuk variabel disposisi t hitung < t tabel (1,417 < 2,028). Dengan demikian diketahui bahwa variabel disposisi secara parsial berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan penjelasan hasil uji parsial (uji t) bahwa disposisi mempunyai hubungan yang positif, namun berpengaruh tidak signifikan terhadap implementasi pengelolaan sampah, maka dapat dikatakan bahwa disposisi berpengaruh sangat kecil sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka semua variabel harus dilaksanakan secara bersama-sama. Artinya disposisi akan berpengaruh signifikan apabila dilakukan bersama-sama dengan variabel lain (komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi. Menurut Winarno (2014:178) dalam membahas model implementasi kebijakan Edwards menjelaskan bahwa tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi kebijakan, sehingga perlu dijelaskan

keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain dan bagaimana variabel itu mempengaruhi proses implementasi kebijakan

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah dapat dilihat melalui tingkat kepatuhan pelaksana kebijakan dan pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan. Agar implementasi kebijakan pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka pelaksana kebijakan harus memiliki kemampuan dan perilaku yang disiplin, jujur dan mempunyai komitmen. Perilaku ini akan membawa para pelaksana kebijakan berada dalam posisi yang telah ditetapkan dan selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawab melalui pemahaman tentang maksud dari pelaksanaan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber dari Bidang Kebersihan Badan Kebersihan dan Pertamanan, para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah pada Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun telah melaksanakan tugas dengan disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Setiap pegawai bidang kebersihan telah diberikan tugas sesuai dengan jabatan / posisi yang telah ditetapkan. Pelaksana kebijakan dengan jabatan structural menjalankan tugas sesuai tupoksi masing-masing. Sedangkan staf dan tenaga honorer diberikan tugas sebagai koordinator lapangan, pengawas dan tenaga administrasi kantor.

Dari wawancara juga dijelaskan bahwa para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah telah diberikan honorarium sesuai dengan beban kerja. Para

pelaksana kebijakan yang bertugas sebagai kordinator diberikan honorarium lebih besar daibanding pengawas, dan begitu seterusnya sesuai beban kerja. Pemberian honorarium ini akan memberikan motivasi bagi para pelaksana kebijakan agar melaksanakan kebijakan sesuai dengan sasaran yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dijelaskan bahwa para pelaksana kebijakan pengelolaan sampah yaitu pegawai badan Kebersihan dan Pertamanan telah bekerja dengan baik, jujur dan bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan pengawasa dilapangan yang dilakukan oleh para pengawas lapangan bidang kebersihan. Disamping itu juga terlihat dari tindak lanjut dari pengaduan masyarakat terhadap permasalahan sampah kota.

Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Tanjung Balai Karimun

Dari hasil analisis data kuantitatif, didapatkan bahwa struktur birokrasi mempunyai hubungan secara positif dengan nilai koefisien regresi 0,108. Koefisien korelasi variabel independen struktur birokrasi sebesar 0,108; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan struktur birokrasi meningkat 1 %, maka nilai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun akan meningkat sebesar 10,8%. Dari hasil uji parsial didapatkan t hitung variabel struktur birokrasi 0,865 dan t tabel 2,028. Sehingga untuk variabel struktur birokrasi t hitung < t tabel. Dengan demikian berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel struktur birokrasi tidak berengaruh secara signifikan terhadap implementasi pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.

Berdasarkan penjelasan hasil uji parsial (uji t) bahwa struktur birokrasi mempunyai hubungan yang positif, namun berpengaruh tidak signifikan terhadap implementasi pengelolaan sampah, maka dapat dikatakan bahwa struktur birokrasi berpengaruh sangat kecil sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik, maka semua variabel harus dilaksanakan secara bersama-sama. Artinya struktur birokrasi akan berpengaruh signifikan apabila dilakukan bersama-sama dengan variabel lain (komunikasi, sumber daya dan disposisi).

Menurut Edwards, oleh karena empat faktor (komunikasi, sumber daya/sumber, disposisi / kecenderungan-kecenderungan dan struktur birokrasi) yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, maka pendekatan yang ideal adalah dengan cara merefleksikan kompleksitas ini dengan membahas semua faktor tersebut sekaligus. Perlu diperhatikan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis yang mencakup banyak interaksi dari banyak variabel. Oleh karenanya, tidak ada variabel tunggal dalam proses implementasi kebijakan, sehingga perlu dijelaskan keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lain dan bagaimana variabel itu mempengaruhi proses implementasi kebijakan. (Winarno, 2014:177-178)

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya yaitu standard operating procedures (SOP) dan fragmentasi (pembagian tugas dan tanggung jawab). SOP merupakan pedoman bagi para

pelaksana kebijakan untuk bertindak atau menjalankan tugasnya. Sedangkan fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan nara sumber dari Bidang Kebersihan Badan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun, dijelaskan bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan sampah, Badan Kebersihan dan Pertamanan telah mempunyai SOP. SOP ini dibuat agar pelaksanaan kebijakan yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam SOP tersebut dan tidak melenceng dari aturan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaannya, SOP yang telah ditetapkan belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena adanya hambatan – hambatan yang berasal dari kurangnya biaya operasional, sarana yang kurang memadai seperti kurangnya TPS dan TPST serta kurangnya sarana pengangkut sampah.

Dari hasil wawancara juga dijelaskan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan implementasi kebijakan telah berjalan, namun belum maksimal. Masih ada sebagian pelaksana kebijakan yang tidak mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas. Hal ini terlihat dari adanya pelaksana kebijakan yang tidak disiplin dalam melaksanakan tugas. Hal ini akan menghambat pelaksanaan tanggung jawab yang diharapkan dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.

Nara sumber juga menambahkan bahwa untuk mencapai sasaran kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun, Badan Kebersihan dan Pertamanan telah melakukan koordinasi dengan organisasi lain. Namun koordinasi belum berjalan dengan maksimal. Koordinasi antar organisasi

diantaranya dilakukan dengan pihak pengelola sampah dan masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat yang peduli dengan kebersihan lingkungan. Koordinasi antara pihak pengelolala sampah dan masyarakat telah dilakukan Badan Kebersihan dan Pertamanan dengan pengelola bank sampah, pengelola TPST dan pengelolala sampah di kawasan perumahan/pemukiman. Diharapkan dengan koordinasi yang dilakukan akan dapat meningkatkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan dengan Perda kabupaten karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab I bahwa penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi secara partial dan secara simultan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan, sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel komunikasi secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel sumberdaya secara partial berpengaruh signifikan terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel disposisi secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel struktur birokrasi secara partial tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.

5. Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumberdaya, diaposisi dan struktur birokrasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tanjung Balai Karimun.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Komunikasi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat (sasaran kebijakan) harus ditingkatkan yaitu dilaksanakan secara berkala dan langsung kepada sasaran (masyarakat). Komunikasi ini dilakukan untuk mensosialisasikan cara pengelolaan sampah seperti yang tercantum dalam Perda Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. Komunikasi yang harus dilakukan agar langsung kepada masyarakat sebaiknya dengan cara pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang cara pengelolaan sampah yang sesuai dengan aturan.
2. Pemerintah harus menambahkan sarana dan prasarana dan menambah biaya operasional pengelolaan sampah agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah kota dapat berjalan dengan baik. Sarana dan prasarana yang perlu ditambah adalah TPS / kontainer sampah, truk dan arm roll, tempat pengelolaan kompos / rumah kompos, tong dengan pemilahan sampah di tempat-tempat umum dan fasilitas pengelolaan sampah di TPA.
3. Agar pemerintah meningkatkan koordinasi dengan pihak lain baik swasta maupun lembaga swadaya masyarakat, yaitu dengan kerja sama dalam hal penanganan sampah di tingkat RT/RW dan Kelurahan.

4. Disarankan agar peneliti selanjutnya menambahkan variabel penelitian lainnya yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Karimun. Salah satu variabel yang sangat mempengaruhi adalah partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah kota.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Agustino, L. (2006). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV. Alfabeta.
- Budiarjo, M. (2000). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Indonesia.
- Cahyono, B. T. (1996). Sumber Daya Manusia.. Jakarta : Penerbi IPWI
- Cangara, H. (2002). Pengantar Ilmu Komunikasi. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada
- Daft, R. L. 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Dunn, W. (2013). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah mada University Press.
- Effendy, O.U. (2003). Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan kesembilan belas. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Ghozali, I. (2005). *Struktural equation modeling, metode alternatif dengan partial leastsquare*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Goldhaber. (1986) *General Organization Comunication*. Iowa Wm. Brown Publisher.
- Gibson, J.L. (et.al). (1997). Organisasi; Perilaku Struktur dan Proses. Alih Bahasa: Nunuk Adiarni. Jakarta: Binarupa Aksara
- Hamdi, M. dan Ismaryati, S. (2014). Metodologi Penelitian Administrasi.. Jakarta: Universitas Terbuka
- Liliwiri, A. (2004). *Dasar-dasar Komunikasi Antar Budaya*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar..
- Muchsin, H. dan Putra, F. (2002), *Hukum dan Kebijakan Publik*. Malang: Averroes,
- Muhammad, A. (2007). *Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Moenir. A.S. (1983) *Pendekatan Manusiawi dan Organisasi Terhadap Pembinaan Karyawan* Jakarta : PT. Gunung Agung,
- Mulyadi D. (2015). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

- Pace, R. Wayne dan Faules, Don F. (2005). *Komunikas Organisasi: Strategi Meningkatkan kinerja perusahaan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwanto, E.A. dan Sulistyastuti (2015). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Robbins, S.P. (1996). *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi dan Aplikasi*. Alih Bahasa : Hadyana Pujaatmaka. Edisi Keenam. Jakarta :.Penerbit PT.Bhuana Ilmu Populer.
- Sirait, A. (1991). *Manajemen*. Jakarta: P.T Gelora Aksara
- Stoner, J.A.F. dan Freeman, R,E. (1994). *Manajemen*. Edisi Kelima. Jilid 2. Jakarta:Intermedia
- Subarsono. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Situmorang, Victor, M. dan Sitanggang. (1993). *Grosse Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*. :Jakarta : Rineka Cipta
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian bisnis*. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.
- Suwerda, B. (2012). *Bank Sampah (Kajian Teori dan Penerapannya)*. Yogyakarta: Pustaka Rihama
- Tangkilisan, H.N. (2003). *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI:
- Tahir, A. (2015). *Kebijakan Publik Dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung. CV. Alfabeta
- Thoha, M. (1993) *Kepemimpinan dalam Manajemen suatu Pendekatan Perilaku*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka.
- Widodo, J. (2001), *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Surabaya: Insan Cendekia*
- Widodo, J. (2010). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep Teori dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Winarno, B. (2005). *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus Yogyakarta.. CAPS*

Sumber Lainnya:**Tesis:**

Misroji. (2014). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyebaran Informasi Publik Mengenai Depok Cyber City Pada Diskominfo Kota Depok . Tesis. Jakarta Universitas Esa Tunggal.

Jurnal:

Said, L.O.A, Mardiono dan Noor, I. (2015) Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Kota Baubau. Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Vol. 4 No. 1

Nugraha, A. (2014). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Cimahi.

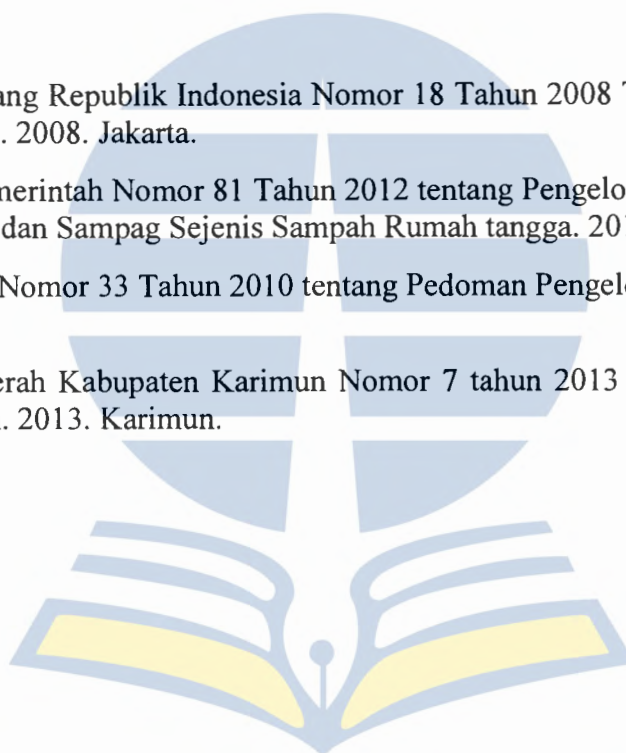
Peraturan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. 2008. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampag Sejenis Sampah Rumah tangga. 2012. Jakarta.

Permendagri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah. 2010. Jakarta.

Peraturan daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. 2013. Karimun.



LAMPIRAN 1. KUISIONER PENELITIAN

KUISIONER PENELITIAN

Petunjuk pengisian :

Pada pertanyaan di bawah ini, Anda dimohon untuk menjawab pertanyaan dengan kondisi sebenarnya dengan memberi tanda **X** pada pilihan yang tersedia atau menulis jawaban .

IDENTITAS RESPONDEN

1. Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita
2. Pendidikan terakhir: a. SMU b. Diploma
c. S1 d. S2
e. S3
3. Jabatan Struktural : a. Eselon II b. Eselon III c. Eselon IV
4. Kepala Badan/Sekretaris /Bidang/Sub Bidang /
.....
5. Lamanya bekerja : Tahun
6. Status berkeluarga : a. Kawin b. Belum Kawin

Petunjuk pengisian :

Pertanyaan dibawah ini berkaitan dengan tugas Bapak/Ibu sebagai aparatur pelaksana kebijakan pengelolaan sampah.

Pada pertanyaan di bawah ini, Bapak/Ibu dimohon untuk menjawab pertanyaan dengan kondisi sebenarnya dengan memberi tanda **X .**

Keterangan :

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Cukup Setuju (CS)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

1. Komunikasi

Mohon Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling tepat dengan menyilang nomor yang tersedia, sesuai dengan praktek yang terjadi selama ini.

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|----|---|---------|----|----|---|----|
| | | STS | TS | CS | S | SS |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Informasi tentang pengelolaan sampah telah disampaikan/disosialisasikan kepada masyarakat | | | | | |
| 2 | Informasi tentang pengelolaan sampah telah disampaikan baik di berbagai media, baik media massa maupun media elektronik | | | | | |
| 3 | Masyarakat telah mengerti dengan informasi tentang pengelolaan sampah yang telah disampaikan | | | | | |
| 4 | Masyarakat telah mengerti tentang cara pengelolaan sampah sebagaimana yang telah diinformasikan / disosialisasikan | | | | | |
| 5 | Informasi pengelolaan sampah yang disampaikan telah sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Krimun No 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah | | | | | |
| 6 | Masyarakat telah memberikan umpan balik kepada lembaga pengelola sampah | | | | | |
| 7 | Kerja sama dan koordinasi antar lembaga pengelola sampah telah berjalan dengan baik | | | | | |

2. Sumber Daya

Mohon Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling tepat dengan menyilang nomor yang tersedia, sesuai dengan praktek yang terjadi selama ini.

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|----|---|---------|----|----|---|----|
| | | STS | TS | CS | S | SS |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8 | Aparatur yang bertugas dalam pengelolaan sampah Badan/Dinas/Kecamatan/Kelurahan memiliki pendidikan minimal SMA | | | | | |
| 9 | Aparatur telah memiliki pengetahuan tentang pentingnya kebijakan pengelolaan sampah | | | | | |
| 10 | Pelaksana kebijakan pengelolaan sampah (aparatur) telah memahami tugas dan tanggung jawab | | | | | |
| 11 | Biaya pengelolaan sampah telah disediakan oleh pemerintah Kabupaten Karimun | | | | | |
| 12 | Biaya operasional pengelolaan sampah telah mencukupi untuk pelaksanaan pengelolaan sampah yang memadai | | | | | |
| 13 | Jumlah sarana dan prasarana penunjang pengelolaan sampah telah memadai | | | | | |
| 14 | Ketersediaan fasilitas umum pengelolaan sampah telah memadai | | | | | |

3. Disposisi

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|----|--|---------|----|----|---|----|
| | | STS | TS | CS | S | SS |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 16 | Aparatur telah melakukan tugas sesuai dengan tujuan kebijakan pengelolaan sampah. | | | | | |
| 17 | Aparatur telah berlaku jujur dalam melaksanakan tugas | | | | | |
| 18 | Aparatur telah bekerja sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. | | | | | |
| 19 | Aparat yang bertugas dalam pengelolaan sampah telah diberikan insentif oleh pemerintah | | | | | |
| 20 | Insentif yang diberikan kepada aparat berupa honorarium | | | | | |

4. Struktur Birokrasi

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|----|--|---------|----|----|---|----|
| | | STS | TS | CS | S | SS |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 21 | Pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilaksanakan telah memiliki SOP | | | | | |
| 22 | SOP yang dimiliki telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. | | | | | |
| 23 | Telah ada pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada aparat pelaksana kebijakan pengelolaan sampah | | | | | |
| 24 | Tugas yang diberikan terlalu luas dan sulit untuk di laksanakan | | | | | |
| 25 | Adanya kerjasama/koordinasi organisasi pelaksana kebijakan dengan pihak lain (instansi pemerintah / swasta/lembaga swadaya masyarakat) | | | | | |
| 26 | Berjalannya pengawasan dari organisasi sesuai kewenangannya | | | | | |

5. Implementasi Kebijakan

Mohon Bapak/Ibu memilih jawaban yang paling tepat dengan menyilang nomor yang tersedia, sesuai dengan praktek yang terjadi selama ini.

| No | Pernyataan | Jawaban | | | | |
|----|---|---------|----|----|---|----|
| | | STS | TS | CS | S | SS |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 27 | Pemerintah telah melakukan program untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah | | | | | |
| 28 | Program yang dilaksanakan pemerintah telah tepat dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan pengelolaan sampah yang telah ditetapkan, | | | | | |
| 29 | Jenis kegiatan yang dilaksanakan unrtuk mendukung program pengelolaan sampah telah sesuai dengan tujuan kebijakan pengelolaan sampah | | | | | |
| 30 | Kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan telah bermanfaat dalam penanganan sampah sesuai dengan tujuan kebijakan pengelolaan sampah. | | | | | |
| 31 | Kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan telah tepat sasaran | | | | | |

LAMPIRAN 2. TABULASI JAWABAN KUISIONER

1. KOMUNIKASI

| Responden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jumlah |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | KM5 | KM6 | KM7 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 24 |
| 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 25 |
| 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 30 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 25 |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 27 |
| 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 24 |
| 9 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| 10 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 29 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 22 |
| 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 22 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 |
| 14 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 19 |
| 15 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 16 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 29 |
| 17 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 27 |
| 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 27 |
| 20 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 26 |
| 22 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 26 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 27 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 27 |
| 27 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 28 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 29 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 26 |
| 30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 28 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 26 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 33 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 34 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 18 |
| 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 27 |
| 36 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 21 |
| 37 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 23 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 39 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 22 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 34 |

2. SUMBER DAYA

| Responden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Jumlah |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | SD1 | SD2 | SD3 | SD4 | SD5 | SD6 | SD7 | |
| 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 29 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 26 |
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 23 |
| 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 10 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 28 |
| 11 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 27 |
| 13 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 14 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 21 |
| 15 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 23 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 17 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| 18 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 25 |
| 19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 23 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 22 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 28 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 26 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 27 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 |
| 29 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 25 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 26 |
| 32 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 30 |
| 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 19 |
| 34 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 21 |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 35 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 24 |
| 36 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| 37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 38 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 19 |
| 39 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 |
| 40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 33 |

3. DISPOSISI

| Responden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jumlah |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP5 | |
| 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 23 |
| 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 24 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 18 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 23 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 21 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 22 |
| 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 22 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 17 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 30 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 31 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 33 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 |
| 34 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 36 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 38 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 39 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| 40 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 17 |
| 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |

4. STRUKTUR BIROKRASI

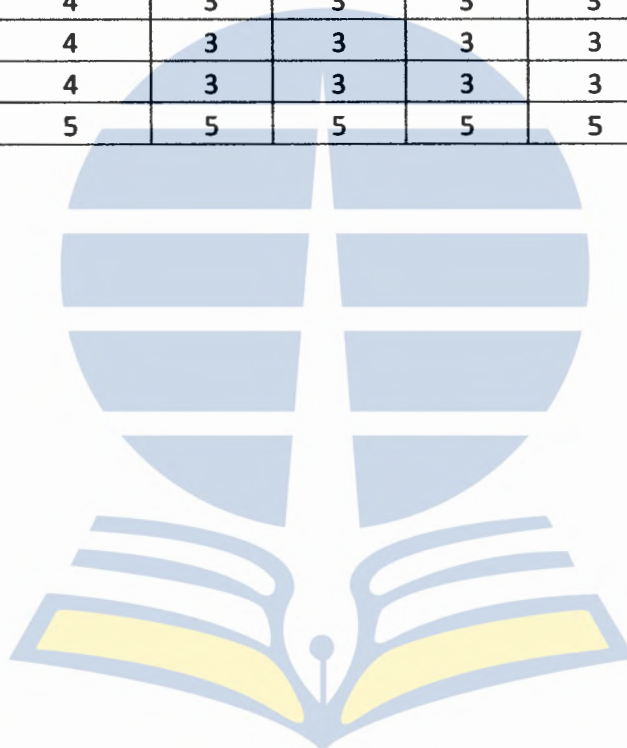
| Responden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Jumlah |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 18 |
| 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 23 |
| 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 23 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 21 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 24 |
| 8 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 21 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22 |
| 10 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 27 |
| 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 25 |
| 13 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 20 |
| 14 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 17 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 20 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 20 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 22 |
| 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 25 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|----|
| 29 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 30 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 22 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 32 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 |
| 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 34 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| 36 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 |
| 37 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 |
| 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 40 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 |
| 41 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 21 |

5. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

| Responden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Jumlah |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|
| | IK1 | IK2 | IK3 | IK4 | IK5 | |
| 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 16 |
| 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 21 |
| 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 19 |
| 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 19 |
| 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 10 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 11 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 |
| 12 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 20 |
| 13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 17 |
| 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 18 |
| 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 16 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 22 |
| 17 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 17 |
| 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 19 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 19 |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 21 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 22 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |

| | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|----|
| 26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 27 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 19 |
| 29 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 |
| 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 18 |
| 31 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 |
| 32 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 22 |
| 33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 34 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 35 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 19 |
| 36 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| 37 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 38 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 40 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 41 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |



LAMPIRAN 3. HASIL ANALISIS DATA MENGGUNAKAN SPSS 23

1. Uji Validitas Dan Reliabilitas

a. Variabel Independen Komunikasi

Correlations

[DataSet13]

| | | Correlations | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | KM5 | KM6 | KM7 | Total |
| KM1 | Pearson Correlation | 1 | .769** | .194 | .169 | .545** | .221 | .439** | .700** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .224 | .291 | .000 | .165 | .004 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| KM2 | Pearson Correlation | .769** | 1 | .252 | .278 | .706** | .448** | .552** | .848** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .111 | .079 | .000 | .003 | .000 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| KM3 | Pearson Correlation | .194 | .252 | 1 | .625** | .274 | .242 | .120 | .588** |
| | Sig. (2-tailed) | .224 | .111 | | .000 | .083 | .128 | .457 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| KM4 | Pearson Correlation | .169 | .278 | .625** | 1 | .349* | .184 | .169 | .613** |
| | Sig. (2-tailed) | .291 | .079 | .000 | | .025 | .250 | .291 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| KM5 | Pearson Correlation | .545** | .706** | .274 | .349* | 1 | .371* | .214 | .731** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .083 | .025 | | .017 | .179 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| KM6 | Pearson Correlation | .221 | .448** | .242 | .184 | .371* | 1 | .219 | .584** |
| | Sig. (2-tailed) | .165 | .003 | .128 | .250 | .017 | | .168 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| KM7 | Pearson Correlation | .439** | .552** | .120 | .169 | .214 | .219 | 1 | .589** |
| | Sig. (2-tailed) | .004 | .000 | .457 | .291 | .179 | .168 | | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Total | Pearson Correlation | .700** | .848** | .588** | .613** | .731** | .584** | .589** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 41 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 41 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .763 | 8 |

b. VariabelIndependenSumberDaya

Correlations

[DataSet14]

Correlations

| | | SD1 | SD2 | SD3 | SD4 | SD5 | SD6 | SD7 | Total |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SD1 | Pearson Correlation | 1 | .645** | .499** | .156 | .046 | -.072 | .162 | .528** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .001 | .332 | .777 | .655 | .312 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SD2 | Pearson Correlation | .645** | 1 | .782** | .290 | .190 | .000 | .198 | .655** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .066 | .233 | 1.000 | .215 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SD3 | Pearson Correlation | .499** | .782** | 1 | .498** | .091 | .000 | .143 | .629** |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .000 | | .001 | .573 | 1.000 | .373 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SD4 | Pearson Correlation | .156 | .290 | .498** | 1 | .197 | .154 | .327* | .574** |
| | Sig. (2-tailed) | .332 | .066 | .001 | | .218 | .335 | .037 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SD5 | Pearson Correlation | .046 | .190 | .091 | .197 | 1 | .728** | .693** | .686** |
| | Sig. (2-tailed) | .777 | .233 | .573 | .218 | | .000 | .000 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SD6 | Pearson Correlation | -.072 | .000 | .000 | .154 | .728** | 1 | .832** | .627** |
| | Sig. (2-tailed) | .655 | 1.000 | 1.000 | .335 | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SD7 | Pearson Correlation | .162 | .198 | .143 | .327* | .693** | .832** | 1 | .778** |
| | Sig. (2-tailed) | .312 | .215 | .373 | .037 | .000 | .000 | | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Total | Pearson Correlation | .528** | .655** | .629** | .574** | .686** | .627** | .778** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 41 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 41 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .756 | 8 |

c. VariabelIndependenDisposisi

Correlations

[DataSet15]

Correlations

| | | DP1 | DP2 | DP3 | DP4 | DP5 | Total |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DP1 | Pearson Correlation | 1 | .667** | .707** | .503** | .529** | .833** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .001 | .000 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| DP2 | Pearson Correlation | .667** | 1 | .697** | .325* | .352* | .750** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .038 | .024 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| DP3 | Pearson Correlation | .707** | .697** | 1 | .569** | .512** | .861** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .000 | .001 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

| | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DP4 | Pearson Correlation | .503** | .325* | .569** | 1 | .749** | .790** |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .038 | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| DP5 | Pearson Correlation | .529** | .352* | .512** | .749** | 1 | .792** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .024 | .001 | .000 | | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Total | Pearson Correlation | .833** | .750** | .861** | .790** | .792** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 41 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 41 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .807 | 6 |

d. Variabel Independen Struktur Birokrasi

Correlations

[DataSet16]

Correlations

| | | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | SB6 | Total |
|-----|---------------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| SB1 | Pearson Correlation | 1 | .689** | .336* | -.174 | .515** | .307 | .626** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .031 | .276 | .001 | .051 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SB2 | Pearson Correlation | .689** | 1 | .402** | .087 | .624** | .497** | .798** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .009 | .590 | .000 | .001 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

| | | | | | | | | |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SB3 | Pearson Correlation | .336* | .402** | 1 | .132 | .227 | .516** | .642** |
| | Sig. (2-tailed) | .031 | .009 | | .411 | .153 | .001 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SB4 | Pearson Correlation | -.174 | .087 | .132 | 1 | .121 | .203 | .405** |
| | Sig. (2-tailed) | .276 | .590 | .411 | | .450 | .203 | .009 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SB5 | Pearson Correlation | .515** | .624** | .227 | .121 | 1 | .672** | .767** |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .000 | .153 | .450 | | .000 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| SB6 | Pearson Correlation | .307 | .497** | .516** | .203 | .672** | 1 | .789** |
| | Sig. (2-tailed) | .051 | .001 | .001 | .203 | .000 | | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Total | Pearson Correlation | .626** | .798** | .642** | .405** | .767** | .789** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .009 | .000 | .000 | |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 41 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 41 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .762 | 7 |

e. Variabel Dependen Implementasi Kebijakan Correlations

{DataSet17}

| | | IK1 | IK2 | IK3 | IK4 | IK5 | Total |
|-------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| IK1 | Pearson Correlation | 1 | .790** | .398* | .335* | .187 | .700** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .010 | .032 | .242 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| IK2 | Pearson Correlation | .790** | 1 | .563** | .449** | .433** | .846** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .003 | .005 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| IK3 | Pearson Correlation | .398* | .563** | 1 | .729** | .486** | .825** |
| | Sig. (2-tailed) | .010 | .000 | | .000 | .001 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| IK4 | Pearson Correlation | .335* | .449** | .729** | 1 | .597** | .797** |
| | Sig. (2-tailed) | .032 | .003 | .000 | | .000 | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| IK5 | Pearson Correlation | .187 | .433** | .486** | .597** | 1 | .696** |
| | Sig. (2-tailed) | .242 | .005 | .001 | .000 | | .000 |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Total | Pearson Correlation | .700** | .846** | .825** | .797** | .696** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| | N | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

| | | N | % |
|-------|-----------------------|----|-------|
| Cases | Valid | 41 | 100.0 |
| | Excluded ^a | 0 | .0 |
| | Total | 41 | 100.0 |

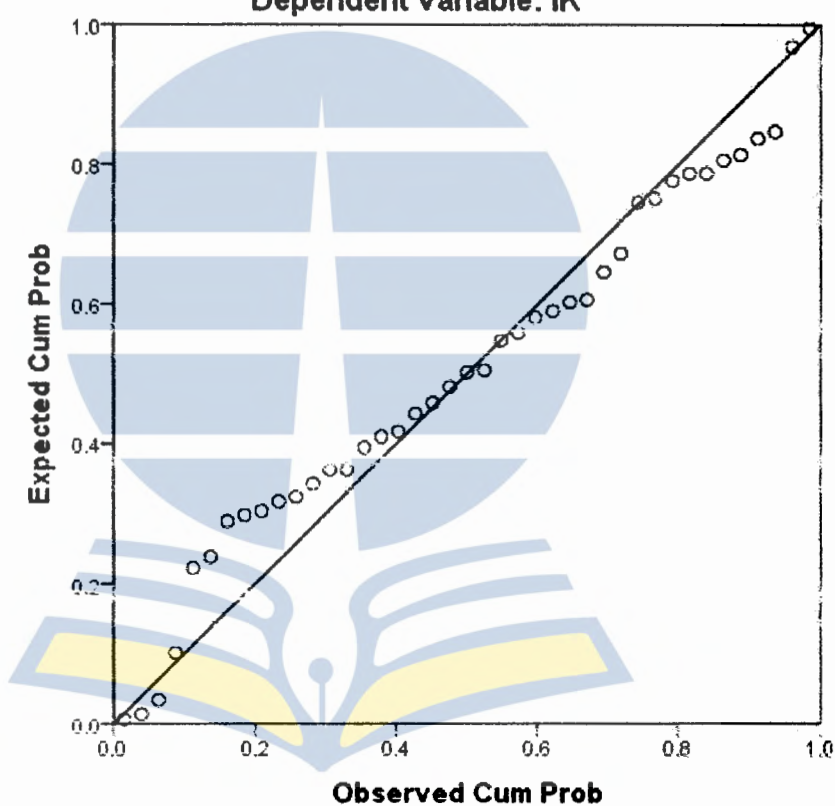
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|------------------|------------|
| .800 | 6 |

2. UjiAsumsiKlasik**a. UjiNormalitas****Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual**

Dependent Variable: IK

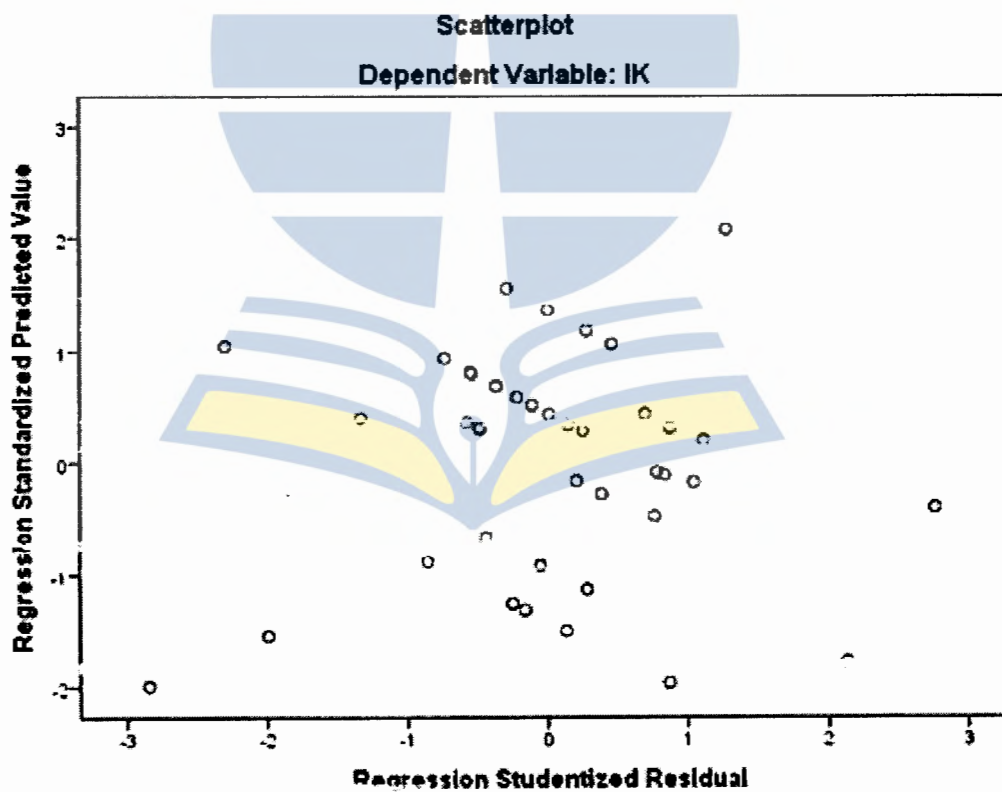


b. Uji Multikolenioritas

| Model | | Coefficients ^a | | | | | | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-----------|-------------------------|--|
| | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Tolerance | VIF | |
| | | B | Std. Error | Beta | | | | | |
| 1 | (Constant) | .996 | 2.121 | | .470 | .641 | | | |
| | KM | .269 | .101 | .363 | 2.671 | .011 | .455 | 2.199 | |
| | SD | .238 | .113 | .314 | 2.094 | .043 | .375 | 2.669 | |
| | DP | .167 | .118 | .181 | 1.417 | .165 | .518 | 1.931 | |
| | SB | .108 | .125 | .110 | .865 | .393 | .521 | 1.920 | |

a. Dependent Variable: IK

c. Uji Heterokedastisitas



3. Uji Lanjut

Regression

[DataSet12]

Variables Entered/Removed^a

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 1 | SB, KM, DP, SD ^b | | Enter |

a. Dependent Variable: IK

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | | Durbin - Watson |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|-----------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | Sig. F Change | |
| 1 | .835 ^a | .697 | .664 | 1.49545 | .697 | 20.725 | 4 | 36 | .000 | 2.278 |

a. Predictors: (Constant), SB, KM, DP, SD

b. Dependent Variable: IK

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 185.393 | 4 | 46.348 | 20.725 | .000 ^b |
| | Residual | 80.509 | 36 | 2.236 | | |
| | Total | 265.902 | 40 | | | |

a. Dependent Variable: IK

b. Predictors: (Constant), SB, KM, DP, SD

Coefficient Correlations^a

| Model | | SB | KM | DP | SD | |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Correlations | SB | 1.000 | -.197 | -.297 | -.242 |
| | | KM | -.197 | 1.000 | -.101 | -.490 |
| | | DP | -.297 | -.101 | 1.000 | -.325 |
| | | SD | -.242 | -.490 | -.325 | 1.000 |
| | Covariances | SB | .016 | -.002 | -.004 | -.003 |
| | | KM | -.002 | .010 | -.001 | -.006 |
| | | DP | -.004 | -.001 | .014 | -.004 |
| | | SD | -.003 | -.006 | -.004 | .013 |

a. Dependent Variable: IK

Collinearity Diagnostics^a

| Model | Dimension | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions | | | | |
|-------|-----------|------------|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | (Constant) | KM | SD | DP | SB |
| 1 | 1 | 4.989 | 1.000 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 2 | .011 | 21.148 | .74 | .05 | .07 | .12 | .01 |
| | 3 | .009 | 23.430 | .00 | .36 | .04 | .65 | .01 |
| | 4 | .006 | 29.166 | .23 | .08 | .00 | .16 | .93 |
| | 5 | .005 | 31.782 | .03 | .51 | .89 | .07 | .05 |

a. Dependent Variable: IK

Residuals Statistics^a

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|----------------|----|
| Predicted Value | 14.7594 | 23.5322 | 19.0488 | 2.15287 | 41 |
| Std. Predicted Value | -1.992 | 2.083 | .000 | 1.000 | 41 |
| Standard Error of Predicted Value | .279 | .963 | .496 | .164 | 41 |
| Adjusted Predicted Value | 14.3220 | 22.4927 | 19.0099 | 2.12125 | 41 |
| Residual | -3.75942 | 3.81862 | .00000 | 1.41671 | 41 |
| Std. Residual | -2.514 | 2.553 | .000 | .949 | 41 |
| Stud. Residual | -2.842 | 2.762 | .011 | 1.039 | 41 |
| Deleted Residual | -4.80502 | 4.46762 | .03882 | 1.71147 | 41 |
| Stud. Deleted Residual | -3.182 | 3.068 | .008 | 1.103 | 41 |
| Mahal. Distance | .419 | 15.608 | 3.902 | 3.280 | 41 |
| Cook's Distance | .000 | .449 | .045 | .097 | 41 |
| Centered Leverage Value | .010 | .390 | .098 | .082 | 41 |

a. Dependent Variable: IK

Regression

Variables Entered/Removed^a

| Model | Variables Entered | Variables Removed | Method |
|-------|-----------------------------|-------------------|--------|
| 1 | SB, KM, DP, SD ^b | | Enter |

a. Dependent Variable: IK

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Change Statistics | | | | Durbin-Watson | |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|-------------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| | | | | | R Square Change | F Change | df1 | df2 | | Sig. F Change |
| 1 | .835 ^a | .697 | .684 | 1.49545 | .697 | 20.725 | 4 | 36 | .000 | 2.278 |

a. Predictors: (Constant), SB, KM, DP, SD

b. Dependent Variable: IK

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 | Regression | 185.393 | 4 | 46.348 | 20.725 | .000 ^b |
| | Residual | 80.509 | 36 | 2.236 | | |
| | Total | 265.902 | 40 | | | |

a. Dependent Variable: IK

b. Predictors: (Constant), SB, KM, DP, SD

Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. | Collinearity Statistics | |
|-------|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|-------------------------|-------|
| | | B | Std. Error | Beta | | | Tolerance | VIF |
| 1 | (Constant) | .996 | 2.121 | | .470 | .641 | | |
| | KM | .269 | .101 | .363 | 2.671 | .011 | .455 | 2.199 |
| | SD | .236 | .113 | .314 | 2.094 | .043 | .375 | 2.669 |
| | DP | .167 | .118 | .181 | 1.417 | .165 | .518 | 1.931 |
| | SB | .106 | .125 | .110 | .865 | .393 | .521 | 1.920 |

a. Dependent Variable: IK

Coefficient Correlations^a

| Model | | | SB | KM | DP | SD |
|-------|--------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Correlations | SB | 1.000 | -.197 | -.297 | -.242 |
| | | KM | -.197 | 1.000 | -.101 | -.490 |
| | | DP | -.297 | -.101 | 1.000 | -.325 |
| | | SD | -.242 | -.490 | -.325 | 1.000 |
| | Covariances | SB | .016 | -.002 | -.004 | -.003 |
| | | KM | -.002 | .010 | -.001 | -.006 |
| | | DP | -.004 | -.001 | .014 | -.004 |
| | | SD | -.003 | -.006 | -.004 | .013 |

a. Dependent Variable: IK

Collinearity Diagnostics^a

| Model | Dimension | Eigenvalue | Condition Index | Variance Proportions | | | | |
|-------|-----------|------------|-----------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| | | | | (Constant) | KM | SD | DP | SB |
| 1 | 1 | 4.969 | 1.000 | .00 | .00 | .00 | .00 | .00 |
| | 2 | .011 | 21.146 | .74 | .05 | .07 | .12 | .01 |
| | 3 | .009 | 23.430 | .00 | .36 | .04 | .65 | .01 |
| | 4 | .006 | 29.166 | .23 | .08 | .00 | .16 | .93 |
| | 5 | .005 | 31.782 | .03 | .51 | .89 | .07 | .05 |

a. Dependent Variable: IK

Residuals Statistics^a

| | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation | N |
|-----------------------------------|----------|---------|---------|----------------|----|
| Predicted Value | 14.7594 | 23.5322 | 19.0488 | 2.15287 | 41 |
| Std. Predicted Value | -1.992 | 2.083 | .000 | 1.000 | 41 |
| Standard Error of Predicted Value | .279 | .963 | .496 | .164 | 41 |
| Adjusted Predicted Value | 14.3220 | 22.4927 | 19.0099 | 2.12125 | 41 |
| Residual | -3.75942 | 3.81862 | .00000 | 1.41871 | 41 |
| Std. Residual | -2.514 | 2.553 | .000 | .949 | 41 |
| Stud. Residual | -2.842 | 2.762 | .011 | 1.039 | 41 |
| Deleted Residual | -4.80502 | 4.46762 | .03892 | 1.71147 | 41 |
| Stud. Deleted Residual | -3.182 | 3.068 | .008 | 1.103 | 41 |
| Mahal. Distance | .419 | 15.608 | 3.902 | 3.280 | 41 |
| Cook's Distance | .000 | .449 | .045 | .097 | 41 |
| Centered Leverage Value | .010 | .390 | .098 | .082 | 41 |

a. Dependent Variable: IK

Lampiran 4. Pedoman Wawancara

DAFTAR PERTANYAAN SEBAGAI PEDOMAN WAWANCARA

1. Pedoman Wawancara Dengan Informan Pelaksana Kebijakan / Badan Kebersihan Dan Pertamanan

DATA INFORMAN

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Jabatan :
- d. Instansi :

a. Komunikasi

- 1) Menurut Bapak, apakah kebijakan pengelolaan sampah dalam hal ini Perda No 7 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sudah disampaikan kepada masyarakat? Jika sudah disampaikan, melalui media apa saja cara penyampaiannya? Mohon penjelasan dari Bapak.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- 2) Apakah informasi yang disampaikan kepada masyarakat tersebut dipahami oleh masyarakat?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....
.....

3) Apakah ada umpan balik dari masyarakat terhadap informasi yang telah disampaikan?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Sumber Daya

1) Apakah SDM pada Bidang Kebersihan Badan Kebersihan Dan Pertamanan ini mencukupi untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah baik disegi kuantitas maupun kualitas?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Apakah SDM yang ada memahami tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....

3) Apakah dana untuk biaya operasional pengelolaan sampah mencukupi untuk melaksanakan kebijakan penelolaan sampah?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4) Apakah sarana dan prasarana pengelolaan sampah mencukupi untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

c. Disposisi

1) Apakah pegawai bidang kebersihan telah melaksanakan tugas dengan disiplin, jujur, dan bertanggung jawab?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Apakah pegawai yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah telah diberi insentif sesuai dengan beban kerjanya?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

d. Struktur Birokrasi

1) Apakah sudah ada Standar Operating Procedures (SOP) dalam pengelolaan sampah? Dan apakah pengelolaan sampah sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab masing – masing pegawai dibidang kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagai pelaksana kebijakan pengelolaan sampah? Apakah sudah berjalan dengan baik?

.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3) Apakah Badan Kebersihan dan Pertamanan telah berkoordinasi dengan pihak lain dalam melaksanaka kebijakan pengelolaan sampah? Bagaimana hubungan antar organisasi dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah tersebut?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

e. Kebijakan

1) Dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, apakah program yang ada telah mendukung terlaksananya kebijakan penghelolaan sampah?

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2) Apakah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah telah bermanfaat dan telah tepat sasaran yaitu untuk pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah?

.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....

Tanjung Balai Karimun,
Informan,

2016

.....
Kepala Bidang..... / Kepala Subbidang
Badan Kebersihan Dan Pertamanan Kab.
Karimun



